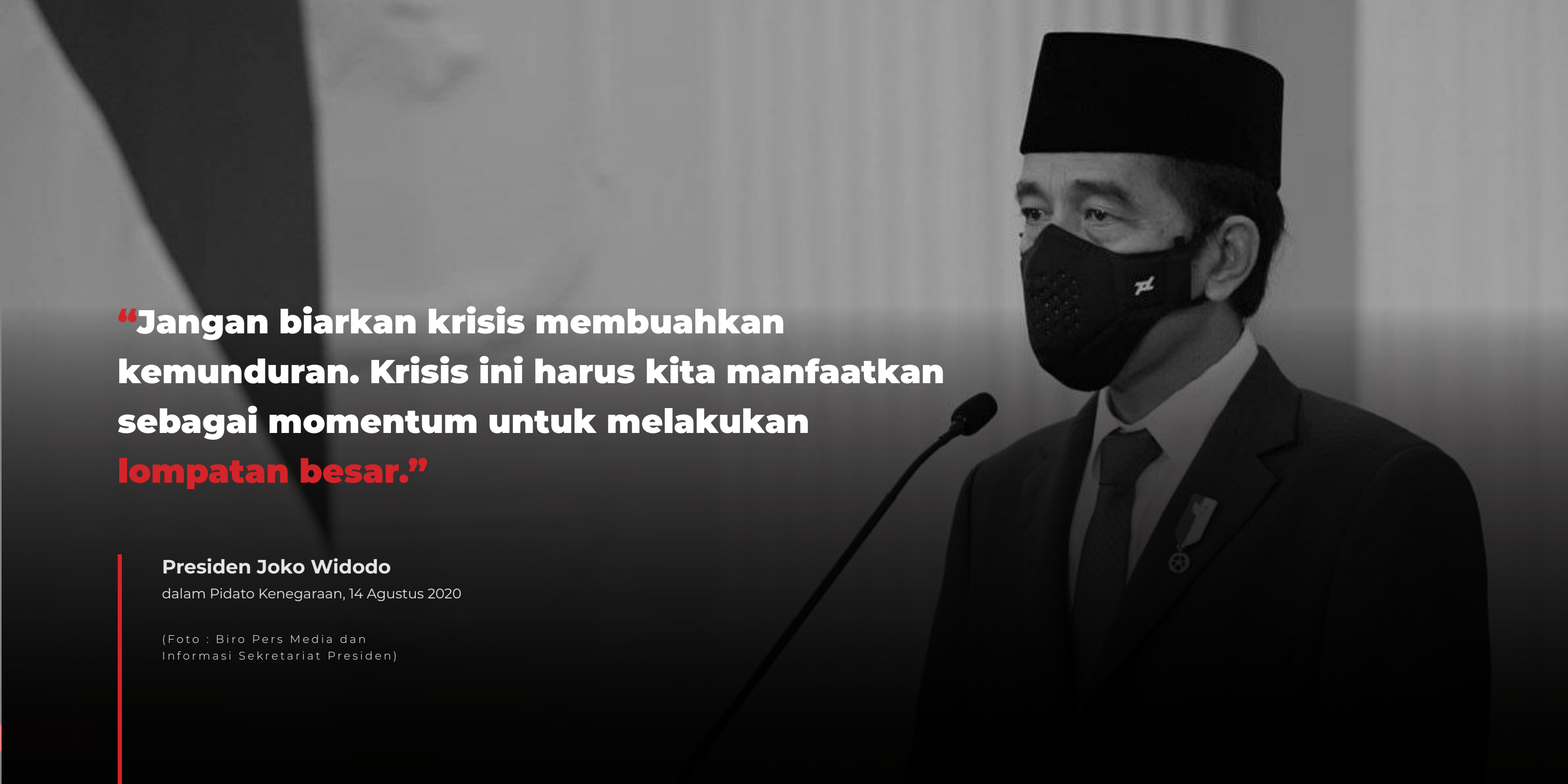




LAPORAN TAHUNAN 2020

BANGKIT UNTUK **INDONESIA MAJU**

A black and white photograph of President Joko Widodo of Indonesia. He is wearing a dark suit, a white shirt, a dark tie, and a black traditional Indonesian cap (peci). He is also wearing a black face mask with a small white logo on the side. He is standing at a podium with a microphone, looking slightly to his left. The background is a light-colored wall with a large, dark, abstract shape on the left side.

“Jangan biarkan krisis membuahkan kemunduran. Krisis ini harus kita manfaatkan sebagai momentum untuk melakukan lompatan besar.”

Presiden Joko Widodo

dalam Pidato Kenegaraan, 14 Agustus 2020

(Foto : Biro Pers Media dan
Informasi Sekretariat Presiden)

Pengantar

Sejak pemerintahan Presiden Jokowi dan Wakil Presiden Jusuf Kalla (2014-2019), laporan tahunan telah menjadi tradisi baru dalam menyampaikan berbagai program dan capaian pemerintah secara umum kepada publik.

Laporan ini memberikan kesempatan seluruh pemangku kepentingan yang ingin mendapatkan perspektif lebih utuh tentang program-program pemerintah -- yang berasal dari visi-misi Presiden. Sehingga menjadi bagian dari rencana pembangunan nasional dan diimplementasikan oleh semua Kementerian dan Lembaga.

Perspektif seperti itu tidak bisa diperoleh dari sumber lain termasuk media massa, yang tentu memiliki keterbatasan akses, ruang, halaman, dan kemungkinan agenda setting-nya sendiri.

Pada periode kedua kepemimpinan Presiden Jokowi, bersama Wakil Presiden K.H. Ma'ruf Amin (2019-2024), tradisi laporan tahunan diteruskan. Selain untuk tujuan diseminasi kinerja pemerintah kepada publik juga sebagai sarana evaluasi tahunan yang memberikan perspektif perbandingan tentang apa yang telah tercapai dan apa yang harus dilakukan pemerintah pada tahun berikutnya.

Laporan tahunan ini kami mulai dengan munculnya *game changer* dunia, Pandemi COVID-19. Indonesia tidak terkecuali harus menghadapinya. Presiden Joko Widodo yang dikenal sebagai pemimpin yang berani mengambil risiko menyerukan agar kita tidak surut menghadapinya. "Kita harus membajak krisis,". Meski menghadapi kondisi sulit, kita meyakini kita akan berhasil melewatinya.

Pandemi ini turut mempengaruhi berbagai rencana dan program. Kami beranggapan berbagai perubahan ini penting disampaikan, sehingga masyarakat dapat mendapatkan informasi yang lebih utuh, termasuk tantangan dan capaiannya.

Presiden tidak pernah mengabaikan janjinya. Meski laju pertumbuhan ekonomi sempat tersendat, tapi Presiden tetap memegang visi mewujudkan lima arahan strategis menuju masyarakat Indonesia yang mandiri, maju, adil dan makmur, yang terdiri dari:

1. Pembangunan Sumber Daya Manusia;
2. Pembangunan Infrastruktur;
3. Penyederhanaan Regulasi;
4. Penyederhanaan Birokrasi; dan
5. Transformasi Ekonomi.

Refocusing dan realokasi anggaran memprioritaskan program dan penanganan di bidang kesehatan, pemulihan sosial dan ekonomi - terutama untuk Usaha Mikro, Kecil dan Menengah serta Koperasi. Namun lima arahan pembangunan tetap menjadi pilar bagi Visi Indonesia 2045 demi memastikan Indonesia menjadi negara maju.

Semoga laporan ini bermanfaat bagi kita semua dan semoga kita semua diberikan kesehatan, kekuatan dan mampu melewati Pandemi COVID-19 dengan selamat.

Jakarta, 20 Oktober 2020
Kepala Staf Kepresidenan Republik Indonesia

Jenderal TNI (Purn.) Dr. H. Moeldoko

Daftar Isi

Pengantar	1
Bagian 1 : Kolaborasi Hadapi Pandemi	
Pandemi Itu Bernama COVID-19	9
Gas dan Rem Melawan Bencana	10
Kolaborasi Solid di Masa Sulit	11
Cepat dan Sigap Mengantisipasi	12
Perjalanan Sang Virus.....	13
Segenap Daya untuk Semua	17
Beleid Pemukul COVID-19	18
Tata Ulang Anggaran Negara.....	19
Ongkos Penanganan COVID-19	20
Dari Masker hingga Hazmat	21
Agresif Lacak Setiap Jejak	22
Sekejap Bersiap Rumah Sakit Darurat	23
Para Martir Dunia Kesehatan	24
Agar Dapur Tetap Ngebul.....	25
Supaya COVID-19 Tak Sempat Mampir.....	26
Dari Pandemi Jadi Inovasi	27
Kreativitas Kikis Krisis	28
Vaksin Merah Putih.....	29
Berburu Cepat Agar Tak Terlambat.....	30
Merayakan Solidaritas	31

Bagian 2 : Pulih dan Bergerak Maju

Kerja Keras Membajak Krisis35

Pilar 1 : Membentuk Manusia Tangguh36

Catatan Kualitas Manusia Indonesia	37
Cegah Stunting Hadapi Bonus Demografi	38
Karena Pendidikan Bukan Beban	39
Merdeka Belajar untuk Masa Depan	40
Sekolah Gratis Hingga Sarjana	41
Merekatkan Vokasi dengan Dunia Kerja	42
Program Kompetensi Pencari Kerja	43
Membangun Indonesia Sehat	44
Satu Data Kesehatan dari Genggaman	45

Pilar 2 : Infrastruktur dan Energi Tetap Berkeadilan46

Terus Mengejar Investasi Infrastruktur	47
Konektivitas Pangkas Biaya Logistik	48
Jembatan Udara Buka Wilayah Terisolir	49
Tol Laut Pacu Ekonomi	50
Wujudkan Mimpi Energi Berkeadilan.....	51
Memangkas Harga Gas.....	52
Bertekad Jadi Pemain Utama	53

Pilar 3 : Kontraksi Ekonomi Bukan Kartu Mati	54
Adaptif Kelola Neraca.....	55
Sinyal Perbaikan Kondisi Ekonomi	56
Agar Lumbung Tak Suwung	57
Pilar 4 : Jalan Terjal Reformasi Birokrasi dan Regulasi	58
Pangkas Aturan Efektifkan Birokrasi	59
Demi Gerak Kian Lincah	60
Urusan Selesai dengan Dilan	61
Kepalang Malu Jika Korupsi	62
Pilar 5 : Meneguhkan Kembali Indonesiasentris	63
Hidup Sejahtera di Daerah Pinggiran	64
Mengurangi Emisi Karbon	65
Kesetaraan Hak Kaum Difabel	66
Pada Rumah Besar Pancasila	67
Memakmurkan Desa	68
Kerangka Baru Pembangunan Papua	69
Penutup	71



#BangkitUntukIndonesiaMaju



Cara Seniman Apresiasi Petugas
Posko COVID-19, Yogyakarta
(Foto : Antara)

BAGIAN 1

**Kolaborasi
Hadapi
Pandemi**

Pandemi itu Bernama COVID-19

COVERID-19 memaksa Indonesia juga ratusan negara di dunia jungkir balik mengatasi dampak pandemi yang luar biasa. Jutaan orang meninggal, puluhan juta orang terinfeksi. Ekonomi global di ambang resesi. Indonesia bertekad, pandemi menjadi momentum kebangkitan baru. Pemerintah pusat hingga daerah harus melakukan reformasi, transformasi dan kolaborasi.



Simulasi Penanganan Pasien COVID-19
RSUD Loekmono Hadi, Kudus, Jawa Tengah
(Foto : Antara)

Penutupan Ruas Jalan di Bandung
(Foto : Antara)

Gas dan Rem Melawan Bencana

Pandemi menuntut pemerintah bekerja cepat juga berakrobat dalam situasi darurat. Aneka beleid diterbitkan sebagai payung hukum. Anggaran dihitung ulang menyesuaikan kondisi pandemi.

Ibarat kendaraan melaju kencang dalam situasi darurat maka gas dan rem harus berjalan proporsional. Keselamatan dan kesehatan menjadi prioritas utama, berbarengan dengan pemulihan ekonomi.

Indonesia memberi apresiasi tinggi bagi tenaga kesehatan. Dari dokter, perawat hingga petugas pendukung lainnya. Dengan berbagai keterbatasan, mereka di garis depan dan bertaruh nyawa dalam perang melawan COVID-19. Lebih dari 200 tenaga kesehatan menjadi martir, menyelamatkan kita dari wabah yang mematikan ini.

Kisah para martir memantik warga bergerak dan melakukan apa saja untuk mencegah dan melemahkan COVID-19 agar tidak mematikan semangat sebuah bangsa. Solidaritas tanpa batas di seluruh nusantara ini menegaskan bahwa kekuatan menghadapi wabah tak bisa disandarkan pada pemerintah saja, tapi perlu campur tangan semua pihak. Kolaborasi inilah yang kemudian dipilih untuk diserukan ke seluruh dunia.

Kolaborasi Solid di Masa Sulit

Awal 2020 dunia digemparkan dengan merebaknya virus SARS-nCoV2, yang selanjutnya diberi nama COVID-19. Ditemukan di China pada 2019, virus ini membawa badai pandemi yang memukul dunia, termasuk Indonesia. Kolaborasi antarnegara dilakukan. Saat menghadapi musuh bersama, ternyata kita bisa solid menghadapi pandemi.



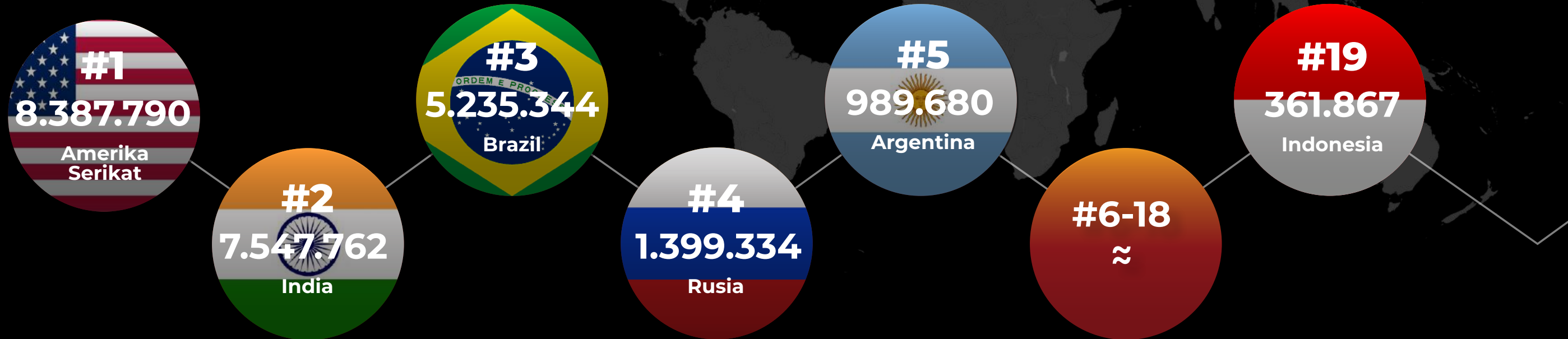
Kasus COVID-19
40.263.734
Orang



Kasus Meninggal
1.118.154
Orang



Kasus Sembuh
30.107.058
Orang

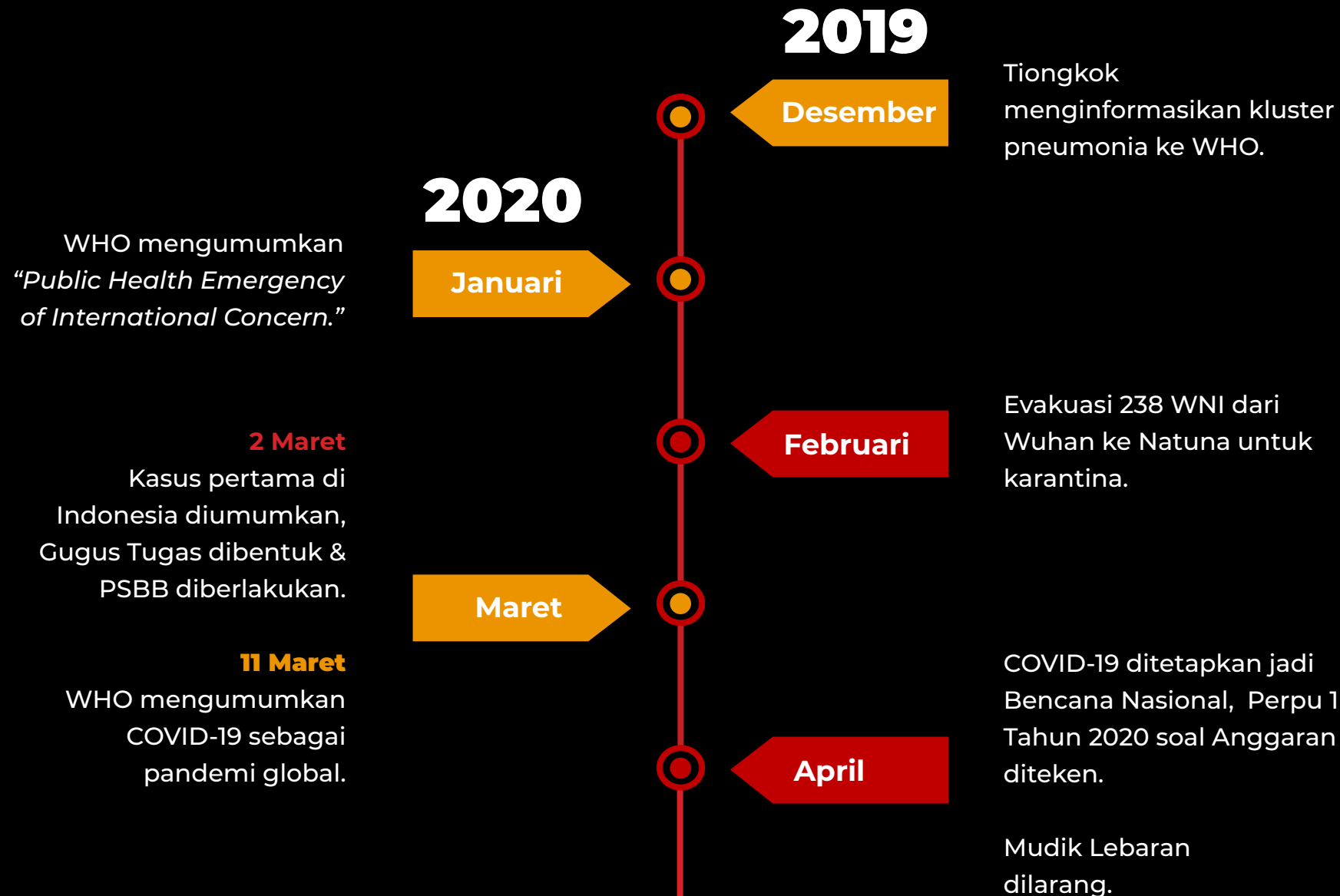


Cepat dan Sigap Mengantisipasi

Indonesia langsung mengantisipasi kemungkinan terburuk. Kampanye protokol kesehatan mulai digiatkan: memakai masker, mencuci tangan dengan sabun, dan menjaga jarak. Di saat bersamaan pemerintah menyiapkan ketersediaan alat tes dan melakukan pelacakan. Sekaligus memastikan ketersediaan rumah sakit dan kesiapan tenaga medis.



Tes COVID-19 di Pusat Perbelanjaan
(Foto : Antara)



Perjalanan Sang **Virus**



Status zonasi COVID-19 diumumkan, Anggaran penanganan COVID-19 naik, Rujukan uji spesimen terus bertambah.

Inpres soal disiplin Protokol Kesehatan diterbitkan. Upaya diplomasi vaksin dilancarkan, Pemerintah beri penghargaan bagi tenaga medis, lebih dari 100 tenaga medis yang gugur.

Pemerintah tetapkan batasan harga swab test dan Presiden teken Perpres Vaksin.

Juni

Agustus

Oktober

Mei

Juli

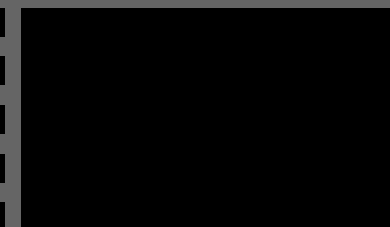
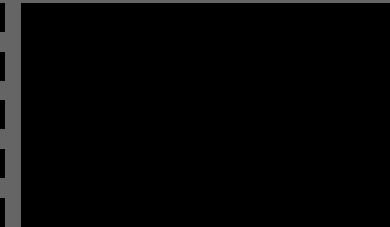
September

Pilkada digeser ke Desember, Perpres Pemulihan Ekonomi diteken. Perpu Keuangan diteken.

Komite Penanganan COVID-19 dan PEN dibentuk, Gas dan Rem dideklarasikan. COVID-19 tembus 100 ribu.

Tim Percepatan Vaksin dibentuk, Operasi Yustisi protokol kesehatan digelar, 9 Provinsi jadi prioritas penanganan COVID-19.

Presiden serukan kolaborasi dunia atasi COVID-19 dalam Sidang PBB.





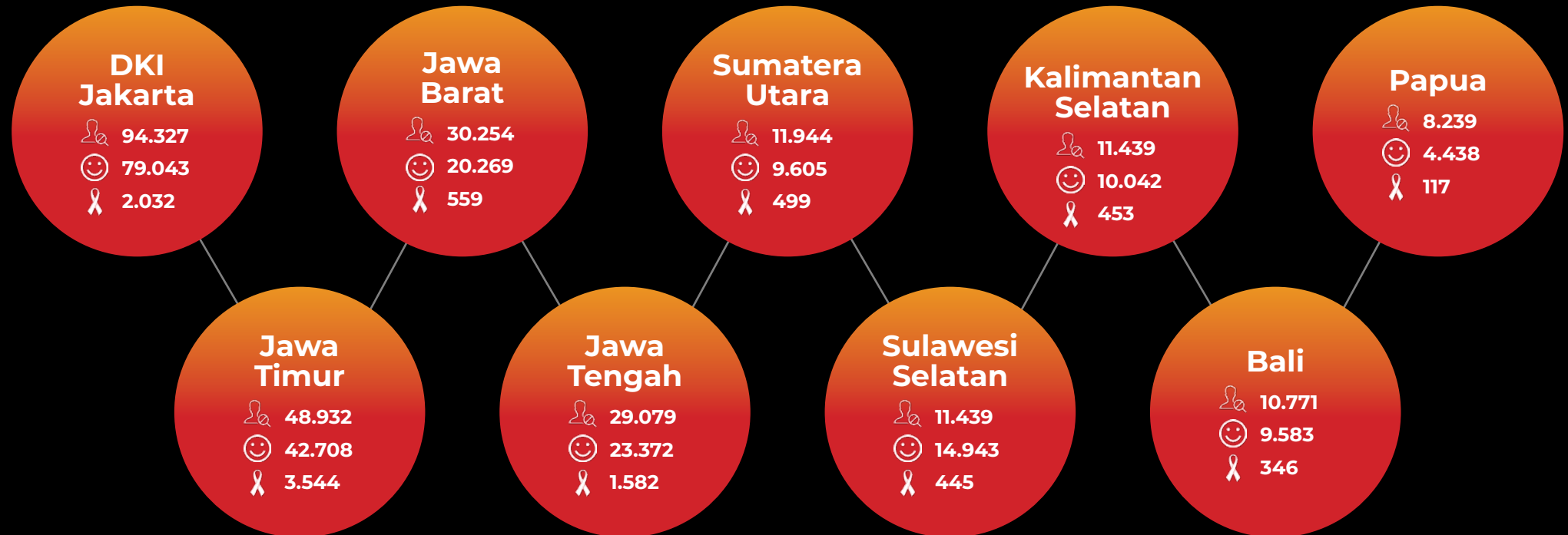
👤 **Jumlah Kasus COVID-19**

😊 **Jumlah Kasus Sembuh**

⚰️ **Jumlah Kasus Meninggal**

Manuver COVID-19 di sembilan provinsi ini dinilai cukup agresif karena penambahan kasus aktif kian meningkat. Presiden membentuk

taskforce untuk menekan 9 provinsi ini dengan mengupayakan *testing, tracing, treatment* untuk menekan kasus COVID-19 di Indonesia.



Sembilan Provinsi Prioritas Penanganan COVID-19

(Sumber : Satgas Penanganan COVID-19, Per 18 Oktober 2020)



**“Dalam mengelola
krisis ini, **gas dan rem**
harus seimbang”**

Presiden Joko Widodo

21 Juli 2020

Presiden Joko Widodo
Pantau Jalan Transpapua
(Foto : Biro Pers Media dan
Informasi Sekretariat Presiden)

Segenap Daya untuk Semua

Pemulangan WNI dari Wuhan, China
(Foto : Antara)

Sebelum wabah menyebar di tanah air, fokus perhatian pada pemulangan WNI di luar negeri yang berada di *epicentrum* COVID-19. Sebanyak 238 WNI dari Wuhan, China dijemput dan menjalani karantina di Pulau Natuna sebelum kembali ke keluarganya. Tidak kurang 23 ribu WNI yang bekerja di pelayaran juga difasilitasi kepulangannya.

Tingginya mobilitas manusia antarnegara akhirnya menjadi jalan masuk COVID-19. Kasus pertama terdeteksi di pemukiman daerah Depok, Jawa Barat, awal Maret. Seolah genderang perang yang mulai ditabuh, pemerintah bergerak cepat berkejaran dengan sebaran COVID-19.



Beleid Pemukul COVID-19

Jumlah kasus positif terus ditekan. Memang, cara paling efektif dengan memutuskan kontak antarmanusia. Beberapa negara menerjemahkannya dengan kebijakan mengunci total (*lock down*) pergerakan penduduknya, meski beresiko lumpuhnya ekonomi.

Indonesia tidak gegabah. Presiden memutuskan menerapkan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB). Interaksi sosial sehari-hari dibatasi. Tak hanya sekolah, kantor, tempat ibadah, dan fasilitas umum untuk sementara ditutup. Setiap daerah bisa mengajukan PSBB ini jika memenuhi syarat. Sejumlah beleid juga diterbitkan untuk menangani COVID-19.



Gugus Tugas Penanganan COVID-19

Keputusan Presiden Republik Indonesia No. 7 Tahun 2020



Penetapan PSBB

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 21 Tahun 2020



Penetapan Kedaruratan Kesehatan Masyarakat

Keputusan Presiden (Keppres) No. 11 Tahun 2020



PERPPU Kebijakan Keuangan untuk Penanganan COVID-19

Disahkan Menjadi Undang-Undang No. 2 Tahun 2020



Refocusing APBN 2020 untuk Penanganan Pandemi

Peraturan Presiden Republik Indonesia No. 54 Tahun 2020



Pembentukan Komite Penanganan COVID-19 dan PEN

Peraturan Presiden No. 82 Tahun 2020



Penegakan Hukum Disiplin Protokol Kesehatan

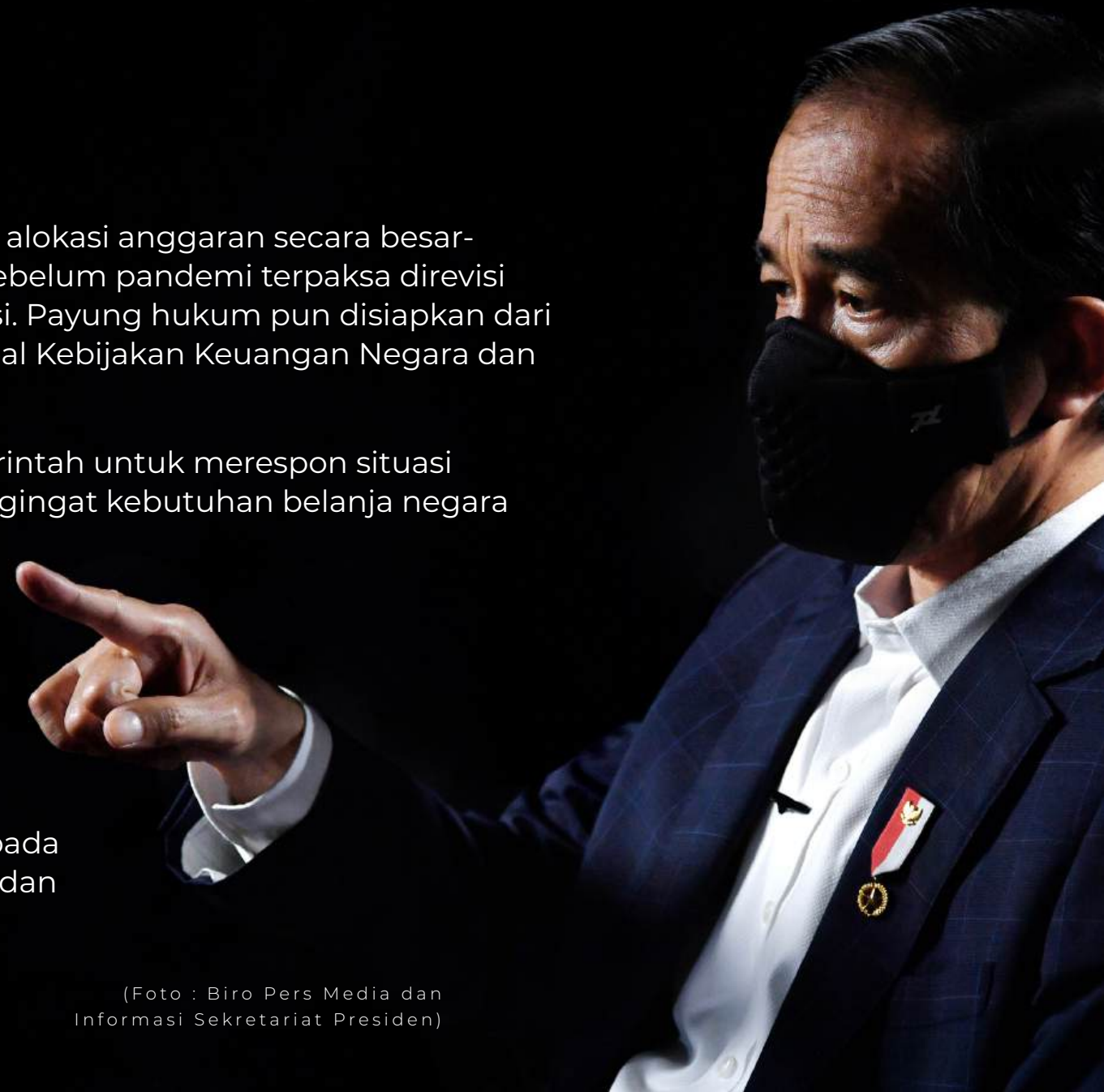
Instruksi Presiden Republik Indonesia No. 6 Tahun 2020

Tata Ulang Anggaran Negara

Ganasnya penyebaran COVID-19 memaksa pemerintah mengubah alokasi anggaran secara besar-besaran untuk menangani wabah ini. APBN 2020 yang disusun sebelum pandemi terpaksa direvisi karena tak bisa menjawab kebutuhan darurat penanganan situasi. Payung hukum pun disiapkan dari Perpu No. 1 Tahun 2020 yang kemudian menjadi UU No. 2 tahun 2020 soal Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan COVID-19.

Beleid keuangan ini sesungguhnya memberikan fleksibilitas bagi pemerintah untuk merespon situasi secara *extraordinary*. Antara lain juga memberikan relaksasi defisit mengingat kebutuhan belanja negara untuk menangani COVID-19 meningkat pada saat pendapatan negara menurun. APBN 2020 pun sudah diubah dua kali dari defisit sebesar 5,07% menjadi 6,34% PDB. Alokasi penanganan COVID-19 menjadi Rp 695,2 T dengan Rp 87,55 T di antaranya difokuskan untuk kesehatan. Dalam RAPBN, pos anggaran serupa juga dialokasikan senilai RP 169,7 T mengingat dampak pandemi diduga masih berjalan hingga 2021.

Kebijakan relaksasi defisit tetap akan berlanjut pada 2021. Di tengah ancaman ketidakpastian global dan domestik, pemerintah tetap fokus pada upaya penyelamatan dari COVID-19, mempercepat pemulihan ekonomi dan penguatan reformasi.

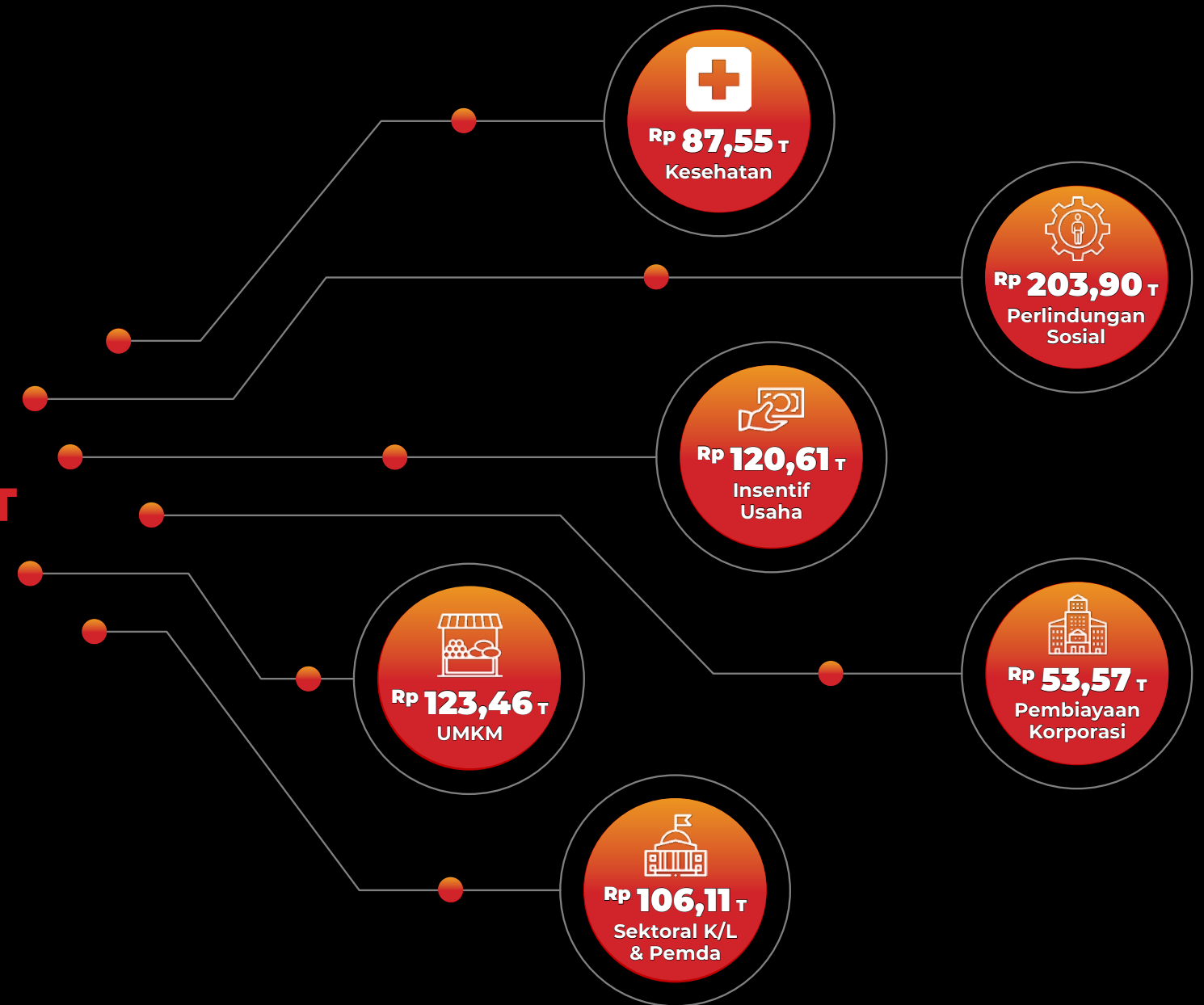


(Foto : Biro Pers Media dan
Informasi Sekretariat Presiden)

Ongkos Penanganan COVID-19

Pemerintah menaikkan alokasi anggaran penanganan COVID-19 dari Rp 677,2 T menjadi Rp 695,2 T. Peningkatan tersebut terjadi karena adanya kebutuhan korporasi dan daerah yang bertambah di tengah upaya pemulihan COVID-19. Alokasi anggaran itu diperuntukan untuk menangani kesehatan, perlindungan sosial, dan dukungan UMKM, dunia usaha, serta Pemda.

Rp 695,20 T

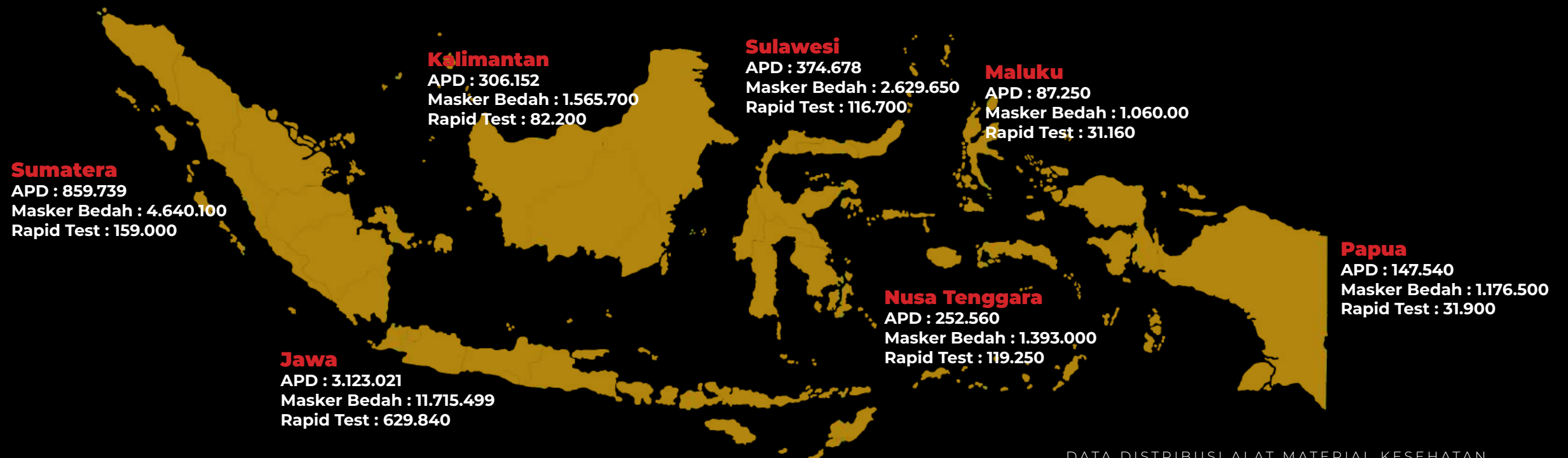


(Sumber Data : Kemenkeu)

Dari Masker hingga Hazmat

Dalam sebulan, jumlah kasus COVID-19 Indonesia naik tinggi. Sebarannya pun meluas. Kebutuhan Alat Pelindung Diri (APD) melonjak. Masker, hazmat, alat rapid, kaca mata pelindung, hingga sepatu boot langka di pasaran. Ketersediaan APD, baru 150 ribu unit. Padahal dalam empat bulan ke depan sekurangnya 4 juta APD harus tersedia.

Pemerintah berburu cepat. Sekurangnya 11 juta APD berhasil dihimpun dari belasan negara dan lembaga-lembaga non-pemerintah. Produksi APD dalam negeri digenjot. Sejumlah sekolah kejuruan, dan industri rumahan digandeng memenuhi kebutuhan. Hasilnya produksi APD saat ini mencapai 17 juta per bulan.



DATA DISTRIBUSI ALAT MATERIAL KESEHATAN
PER TANGGAL 10 OKTOBER 2020

Sumber Data: Satgas Penanganan COVID-19

Agresif Lacak Setiap Jejak

CCOVID-19 menyebar agresif. Indonesia tidak boleh kalah. Sebarannya terus diburu melalui uji spesimen. Jumlah dan jangkauannya pun terus ditingkatkan. Dari hanya ratusan di bulan pertama, kini lebih dari 38 ribu spesimen diperiksa setiap hari. Setiap orang yang terdeteksi mengidap COVID-19, dilakukan pelacakan untuk mencegah kemungkinan menularkan kepada orang lain.



(Foto : Antara)



Jumlah Diperiksa
2,31 Juta
Orang



Jumlah Tes
8.539
Spesimen/1 Juta Penduduk



Jumlah Lab
376
Laboratorium

Sekejap Bersiap Rumah Sakit Darurat

Jumlah rumah sakit rujukan COVID-19 digenjut. Bahkan berbagai fasilitas baru ikut disiapkan sebagai tempat isolasi dan perawatan khusus pasien COVID-19. Wisma Atlet di Jakarta hanya dalam tempo empat hari diubah peruntukannya menjadi rumah sakit khusus pasien COVID-19 dengan fasilitas yang lengkap.

Pemerintah bahkan membuat rumah sakit darurat dua lantai yang cukup canggih di Pulau Galang hanya dalam kurun waktu kurang dari sebulan. Total ada 903 rumah sakit yang siap melayani pasien COVID-19, dengan 51.198 tempat tidur yang tersedia. Antisipasi ini terbukti ampuh. Tidak satupun pasien COVID-19 yang butuh perawatan intensif, terlantar dan tidak mendapat pelayanan.

Ruang isolasi Mandiri COVID-19, Petrokimia, Gresik
(Foto : Antara)

Para Martir Dunia Kesehatan

Lima bulan setelah COVID-19 masuk tanah air, jumlah kasus positif tembus 100 ribu penderita. Upaya keras dilakukan untuk menekan risiko terburuk yang bisa berakibat kematian.

Terdapat 16 ribu tenaga kesehatan dan 3.500 dokter *internship* serta relawan yang menjadi ujung tombak melawan COVID-19. Tidak jarang mereka hanya bisa pulang bertemu keluarga sebulan sekali demi menghindari kemungkinan penularan.

Risiko besar itu menimbulkan korban dari para tenaga kesehatan. Tercatat 127 dokter dan 92 perawat meninggal saat bertugas. Pemerintah sangat mengapresiasi kerja berani mereka. Menjelang peringatan Proklamasi Kemerdekaan, Presiden Joko Widodo menganugerahkan bintang jasa kepada para pahlawan dunia kesehatan ini.

Dedikasi Tenaga Kesehatan di RSUD Arifin Achmad, Pekanbaru
(Foto : Antara)

Agar Dapur Tetap Ngebul

Berbagai insentif diberikan bagi pengusaha kecil dan menengah. Pinjaman kredit modal kerja disiapkan sebesar Rp 100 triliun bagi 5,3 juta penerima. Subsidi bunga pinjaman juga diberikan pada 60,66 juta penerima bantuan. Belum lagi insentif pajak dan penempatan dana pemerintah di perbankan untuk restrukturisasi debitur UMKM senilai Rp 123,46 triliun. Kelonggaran lain juga diberikan berupa pembebasan biaya listrik selama tiga bulan bagi 24 juta pelanggan listrik 450VA, dan diskon 50 persen untuk 7 juta pelanggan 900VA bersubsidi.

Kelompok-kelompok masyarakat juga mendapat perhatian. Pemerintah siapkan anggaran Rp 26,5 milyar bagi pelaku budaya. Tak lupa, industri media sebagai partner pemerintah diberikan sejumlah insentif. Mulai dari pemotongan iuran BPJS hingga 99 persen, penghapusan pajak kertas, serta alokasi dana untuk kampanye sosialisasi penanggulangan COVID-19.



Bansos Sembako



Bantuan Sosial Tunai



BLT Dana Desa



Insentif Tarif Listrik



Kartu Prakerja



Subsidi Gaji Karyawan



BLT Usaha Mikro & Kecil



Bantuan Pulsa untuk Siswa & Guru



Apresiasi bagi Pelaku Budaya



Insentif bagi Industri Media



Insentif Korporasi



Insentif Pajak

Supaya COVID-19 Tak Sempat Mampir

Pandemi ini memperkokoh semangat gotong royong untuk hadapi COVID-19. Melestarikan kearifan lokal dalam menjalani kehidupan *new normal* untuk memutus mata rantai COVID-19. Melalui konsep Kampung Tangguh, masyarakat berinisiatif mengatasi masalah secara mandiri. Memperkuat silaturahmi untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Mulai dari ruang isolasi, posko kesehatan, dapur umum, hingga lumbung pangan dapat dimanfaatkan secara bersama.

Pemenuhan kebutuhan tersebut membentuk karakter baru yang patuh protokol kesehatan. Masyarakat akan disiplin mematuhi protokol kesehatan dengan sendirinya tanpa perlu diimbau lagi. Sehingga dengan keberagaman suku, agama, dan bahasa menjadi bagian perekat nasional.

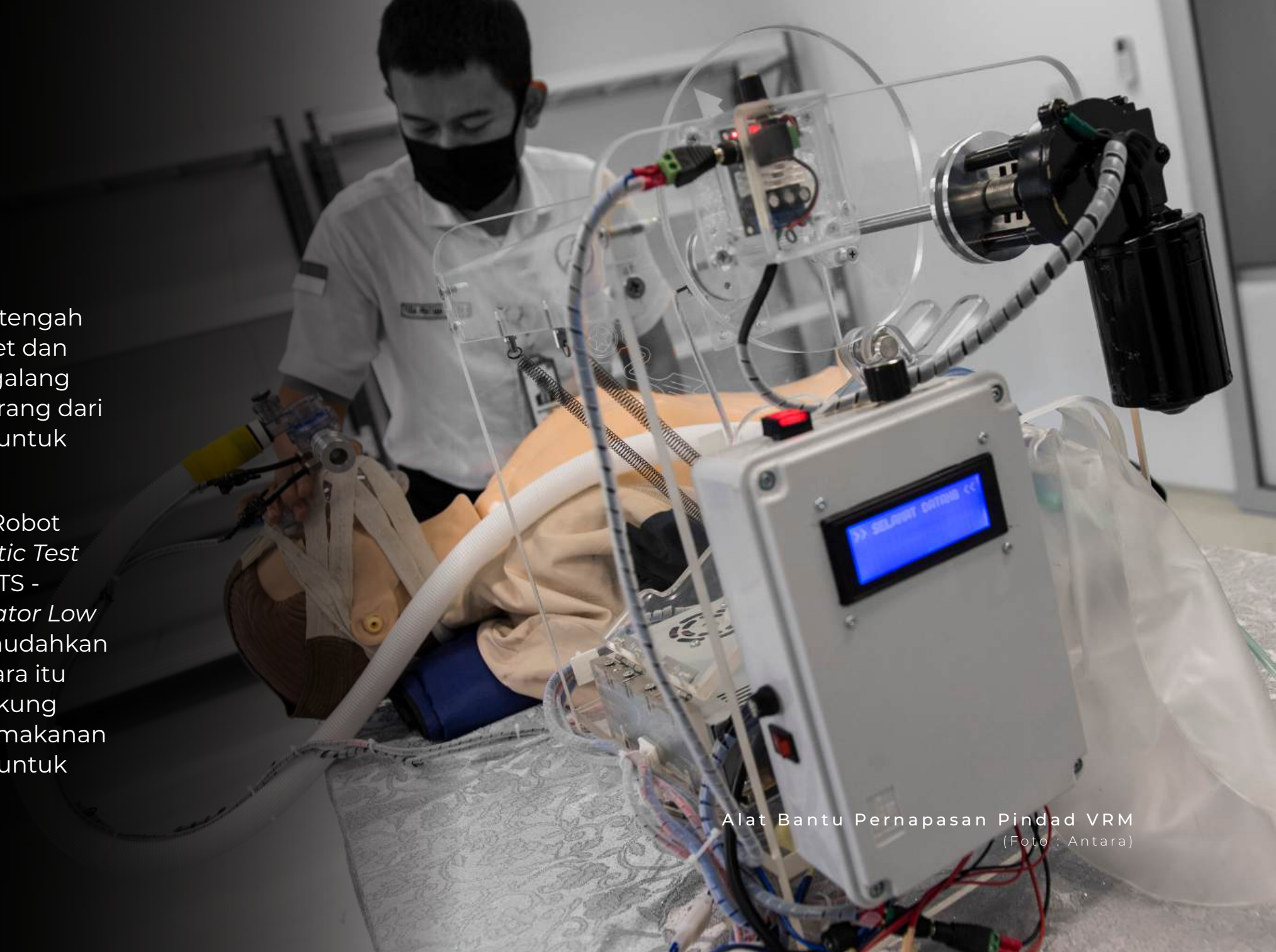


Menanam Sayur Sendiri di Masa Pandemi
(Foto : Antara)

Dari Pandemi Jadi Inovasi

Kreativitas seringkali muncul di tengah kesulitan dan krisis. Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) menggalang inovasi di bidang teknologi. Tidak kurang dari 60 inovasi hasil riset dikembangkan untuk menghadapi pandemi.

Produk Inovasi Utama di antaranya Robot Dekontaminasi, atau *Rapid Diagnostic Test Microchip*, *Robot Medical Assistant ITS - UNAIR (RAISA)* hingga *Mobile Ventilator Low Cost* berhasil ditemukan untuk memudahkan perlawanan pada pandemi. Sementara itu ada pula hasil Produk Inovasi Pendukung yang menghasilkan produk-produk makanan dan minuman dengan bahan alami untuk menjaga kesehatan tubuh.



Alat Bantu Pernapasan Pindad VRM
(Foto : Antara)

Kreativitas Kikis Krisis

Masyarakat juga melahirkan berbagai inovasi. Para pedagang yang biasanya selalu mengandalkan penjualan secara langsung, kini dengan berani memasarkan produknya secara daring. Pembatasan pasar, membuat masyarakat secara mandiri melayani lingkungannya dengan saling memenuhi kebutuhan sehari-hari.

Digitalisasi Pasar Batik
(Foto : Antara)



Vaksin Merah Putih

Salah satu inovasi penting yang sedang disiapkan berupa vaksin COVID-19. Keberadaan vaksin ini menjadi kebutuhan mendesak di seluruh dunia.

Vaksin yang sedang disiapkan ini diberi label Vaksin Merah Putih. Adalah Lembaga Biomolekuler Eijkman yang memimpin konsorsium

pengembangan vaksin COVID-19 yang berupa protein rekombinan.

Menteri Riset dan Teknologi/ Kepala Badan Riset dan Inovasi Nasional (Menristek/ Kepala BRIN) Bambang PS Brodjonegoro mengatakan, vaksin Merah Putih ditargetkan selesai pada pertengahan tahun depan.

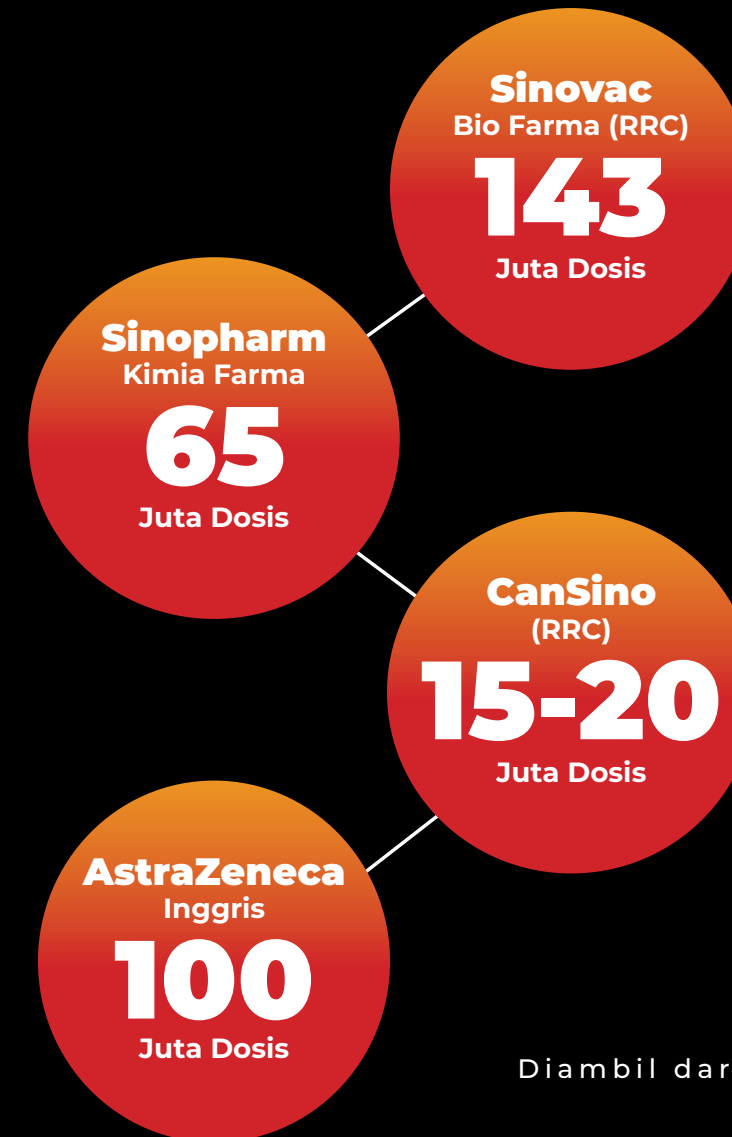
Vaksin merah putih ini dibuat menggunakan *strain* COVID-19 Indonesia. Saat ini pengembangannya sudah lebih dari separoh jalan. Lembaga Eijkman akan menyerahkan bibit vaksin tersebut kepada PT Bio Farma Januari mendatang untuk dilakukan tiga tahap uji klinis.

Vaksinasi MR di Denpasar
(Foto : Antara)

Berburu Cepat Agar Tak Terlambat

Mengingat jumlah penduduk Indonesia yang mencapai 267 juta jiwa, kebutuhan vaksin sangatlah mendesak. Vaksin produksi sendiri tak akan bisa memenuhi. Kerjasama dengan produsen vaksin asing, perlu dijalin. Saat ini Indonesia menggandeng tiga perusahaan vaksin China: Sinovac, Sinopharm, dan CanSino.

Indonesia meneken kesepakatan dengan Sinovac untuk menyediakan 143 juta dosis konsentrat vaksin COVID-19 dimulai November 2020. Sementara itu, vaksin dari Sinopharm sedang menjalani uji coba klinis tahap ketiga di Uni Emirat Arab.



Diambil dari berbagai sumber
(sampai Oktober 2020)

Merayakan **Solidaritas**

Sejah negeri tak berhenti berkisah soal solidaritas yang menjadi kekuatan menghadapi hambatan. Sebuah kekuatan energi yang menembus sekat agama, suku, ras dan status sosial, serta mengerakkan masyarakat ikut terlibat memikul beban dengan segala hal yang dimiliki dan dikerjakan.

Bermula dari kegelisahan warga atas hidup yang kian sulit akibat wabah yang entah sampai kapan. Lalu muncul ide sederhana: membantu sesama dengan menghimpun tenaga dan sumber daya. Dari skala kecil, kampanye hidup sehat, membuat dapur umum bagi warga yang kekurangan, membeli produk tetangga dan kolega yang terkena PHK, hingga beramai-ramai ikut merakit dan menjahit alat pelindung diri (APD) ketika barang itu langka dan jadi rebutan dunia.

Lomba Agustusan Dengan Protokol Kesehatan
(Foto : Antara)

Ibu-ibu bergerak membuat masker kain dan APD untuk dibagikan gratis mengingat masker langka dan harganya tak terjangkau. Ada juga yang menyediakan rumah, gedung sampai hotel untuk menjadi rumah sakit darurat. Para seniman menggelar pertunjukan online. Selain membuat gembira, juga menghimpun dana. Tak disangka, dana mengalir tanpa henti dan diberikan bagi warga terdampak COVID-19.

Ini hanya sebagian dari jutaan kebaikan yang lahir dari solidaritas. Pada akhirnya sejarah mencatat, bangsa ini selamat dari ujian berat bukan pemerintah saja yang harus bekerja cepat tetapi karena kita menyadari ada solidaritas yang menjadikan kita kuat.

Produksi Permintaan Alat Pelindung Diri
(Foto : Antara)

**“SDM Indonesia harus
disiapkan **untuk mampu
bersaing**, cepat beradaptasi
dengan perubahan dan
perkembangan teknologi
informasi yang mendisrupsi
segala bidang.”**

Wakil Presiden K.H. Ma'ruf Amin

13 Oktober 2020

(Foto : Antara)





**Pulih dan
Bergerak
Maju**

BAGIAN 2



Kerja Keras Membajak Krisis

Kerja keras mencapai kemajuan adalah demi menjadikan Indonesia Negara Maju. Tekad itu sudah bulat, puguh. Tak akan surut nyali menghadapinya. Apapun halangannya.

Waktunya singkat, 2045 sudah dekat. Tahun pertama periode pemerintahan Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden K.H. Ma'ruf Amin menjadi bagian dari proses menuju Indonesia satu abad. Tak ada pilihan lain, mau tak

mau, suka atau tidak suka, Indonesia harus membajak krisis sebagai sebuah momentum untuk melompat maju.

Reformasi fundamental menjadi sebuah keniscayaan yang harus dilakukan segera, dalam pola pikir dan etos kerja. Harus cepat, tepat dan fleksibel. Efisiensi, kolaborasi, dan teknologi jadi prioritas. Kedisiplinan dan produktivitas harus ditingkatkan.

Saatnya mengejar ketertinggalan meski dalam keterbatasan. Lima prioritas menjadi jawaban yang harus dikerjakan: meningkatkan SDM, keberlanjutan pembangunan infrastruktur, transformasi ekonomi, penyederhanaan regulasi, dan reformasi birokrasi.

Membentuk Manusia Tangguh

Pembangunan Sumber Daya Manusia menjadi kunci Indonesia ke depan. Waktunya pendek, hanya satu generasi saja untuk mempersiapkan anak-anak Indonesia agar mampu menjawab pertarungan global. Ini tantangan sekaligus kesempatan besar yang harus dijawab dengan kerja keras, kerja cepat, dan dengan cara-cara yang cerdas.

Membentuk manusia tangguh Indonesia, harus dari masa dalam kandungan hingga anak usia sekolah. Sebuah periode emas pertumbuhan ke depan. Hindarkan dari stunting, kematian ibu dan anak.

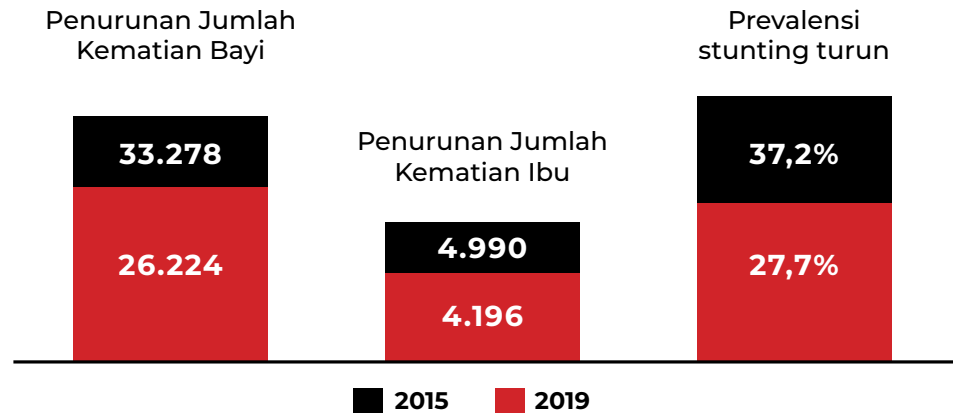
Ekosistem pendidikan yang menyehatkan fisik dan mental juga disiapkan. Begitupun sekolah vokasi. Orang-orang bertalenta juga perlu difasilitasi. Penciptaan ekosistem lapangan kerja harus membuatnya kian berdaya saing, kreatif, inovatif, serta sehat dan bahagia.



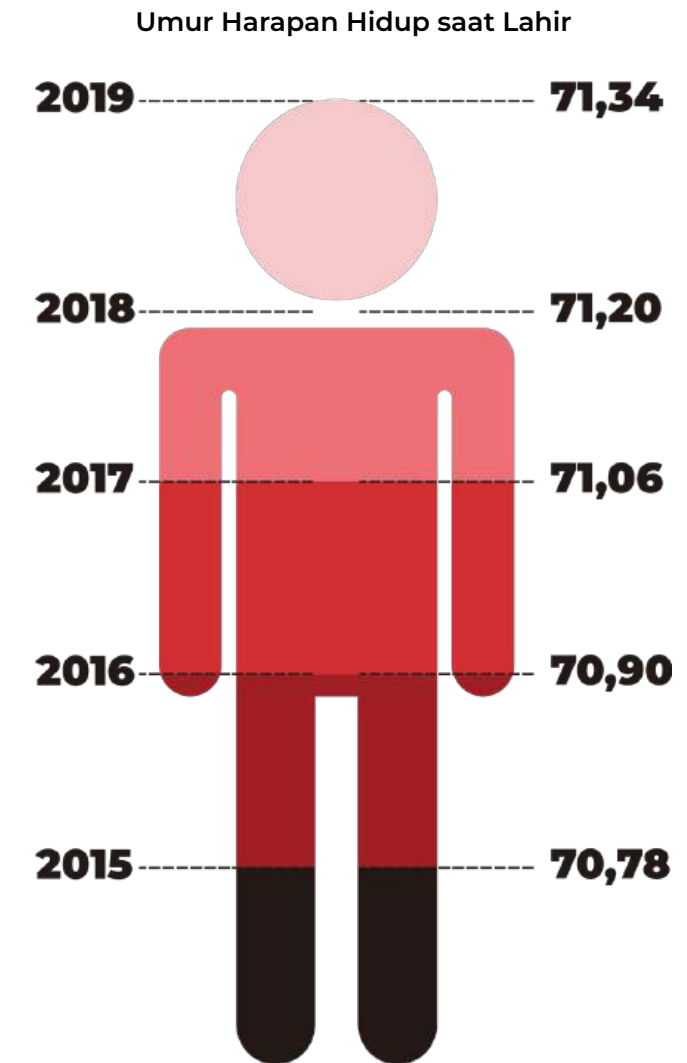
Pendidikan di Perbatasan Merauke
(Foto : Antara)

Catatan Kualitas Manusia Indonesia

Kualitas manusia Indonesia (Indeks Pembangunan Manusia) dari tahun ke tahun mencatatkan pertumbuhan yang kian membaik. Bayi yang lahir tahun 2019 memiliki harapan untuk hidup hingga 71,34 tahun, lebih lama 0,56 tahun dibanding mereka yang lahir empat tahun sebelumnya. Pun juga harapan menikmati pendidikan lebih lama ketimbang sebelumnya. Perlu digenjot lagi untuk mendorong peringkat dibanding negara di Asia Tenggara.



Sumber Data: Kementerian Kesehatan 2020



Sumber Data: BPS



Pemeriksaan Kesehatan Warga Pesisir Karawang
(Foto : Antara)

Cegah **Stunting** Hadapi Bonus Demografi

Pekerjaan rumah terbesar pemerintah dalam menyiapkan SDM adalah menurunkan tingkat stunting di Indonesia. Faktor terpenting adalah pemerataan ekonomi demi mengurangi tingkat kemiskinan.

Kasus stunting yang menurunkan kualitas hidup anak Indonesia harus dicegah. Agar sumber daya manusia Indonesia memiliki daya saing di kancah global.

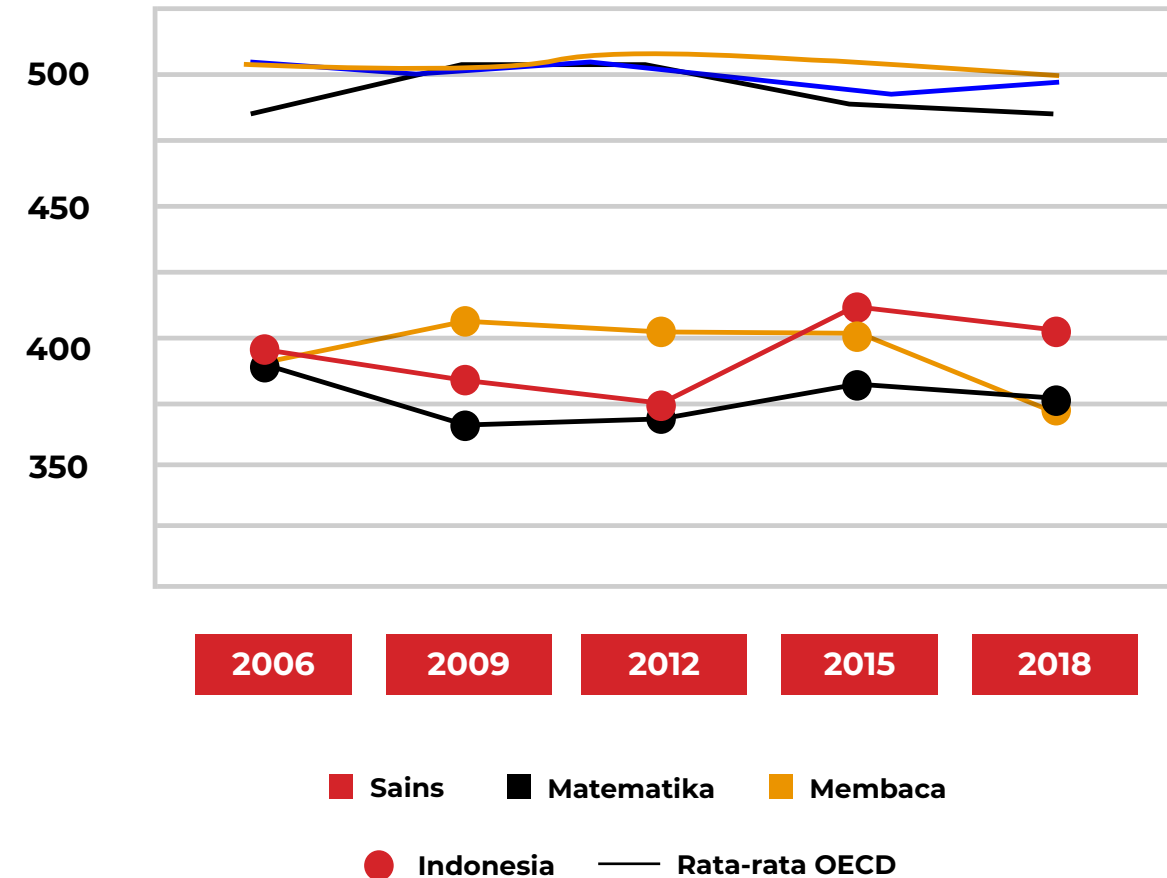
Pencegahan stunting dimulai dari persiapan calon ibu hingga menjaga perkembangan bayi agar kualitas hidup anak Indonesia lebih baik. Sehingga puncak bonus demografi di Indonesia pada 2030 tidak terbuang sia-sia.

Karena Pendidikan Bukan Beban

Banyak tantangan sektor pendidikan di tanah air yang harus dibenahi. Terutama bagaimana anak-anak di Indonesia di berbagai pelosok tanah air mendapatkan kesempatan seluasnya untuk bersekolah hingga kuliah. Mereka juga harus bersiap menghadapi persaingan global, dari usia dini hingga jenjang pendidikan tinggi.

Selain itu juga soal meningkatkan skor PISA (*Programme for International Student Assessment*) atau kemampuan siswa di bidang sains, membaca, dan matematika. Ekosistem pendidikan juga disentuh agar responsif pada perubahan. Reformasi pendidikan melalui transformasi kepemimpinan kepala sekolah mulai dilakukan.

Programme for International Student Assessment (PISA)



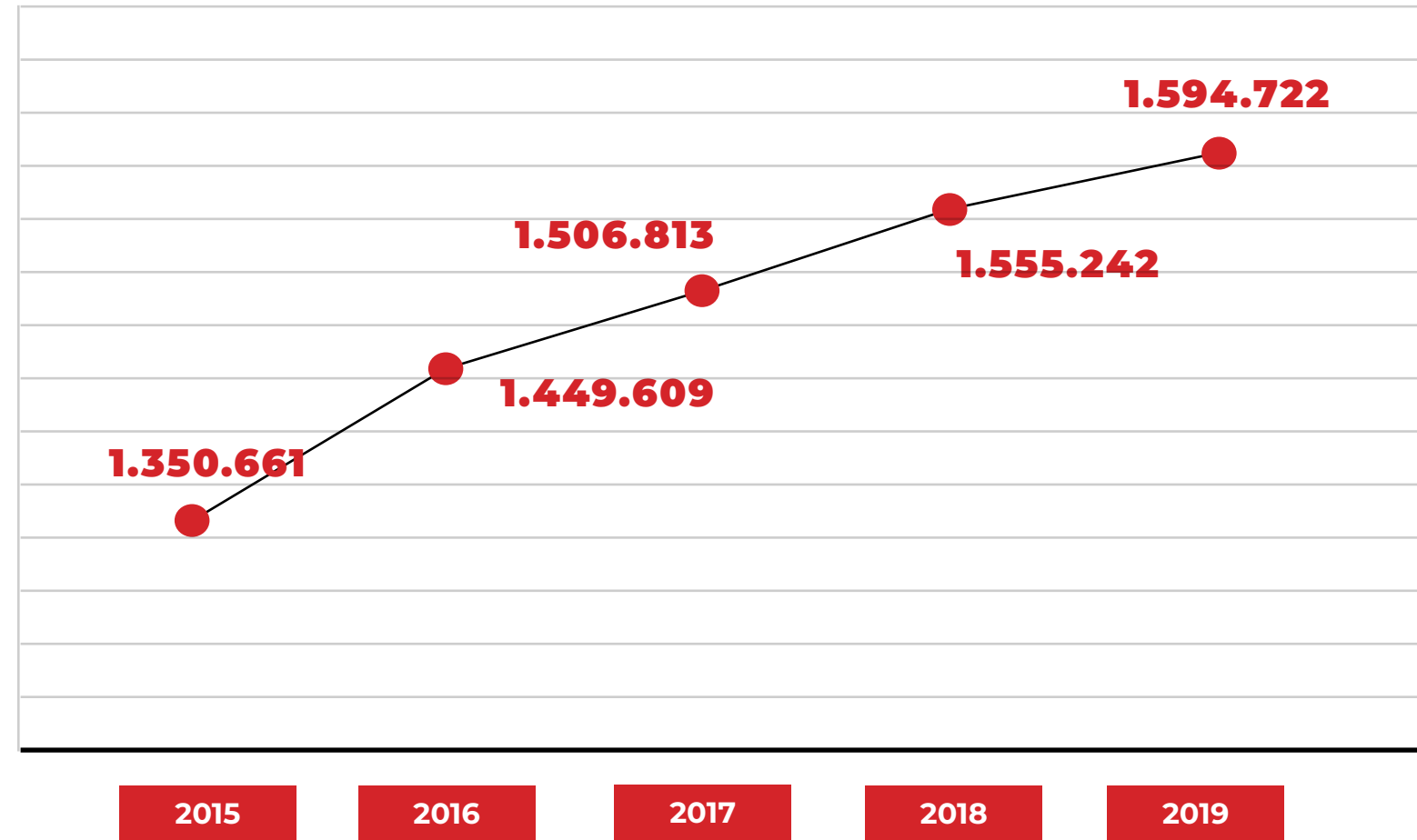
Sumber Data: Organisation for Economic Co-operation and Development (OECD)

Merdeka Belajar untuk Masa Depan

Lembaga pendidikan juga ikut direformasi agar merdeka dari tekanan administrasi, prestasi, penerimaan siswa baru, hingga akreditasi. Bahkan juga ketegangan soal nilai, ujian nasional atau ujian kelulusan hingga kesejahteraan guru.

Merdeka Belajar menjadi penting agar guru dan siswa mengikuti sekolah dengan menarik dan membahagiakan, namun tetap berorientasi pada peningkatan kualitas pendidikan dan masa depan. Di tingkat kuliah, Merdeka Belajar memberikan dorongan bagi kampus untuk membuka program studi baru serta akreditasi yang lebih fleksibel. Juga adaptif dengan kebutuhan dunia kerja.

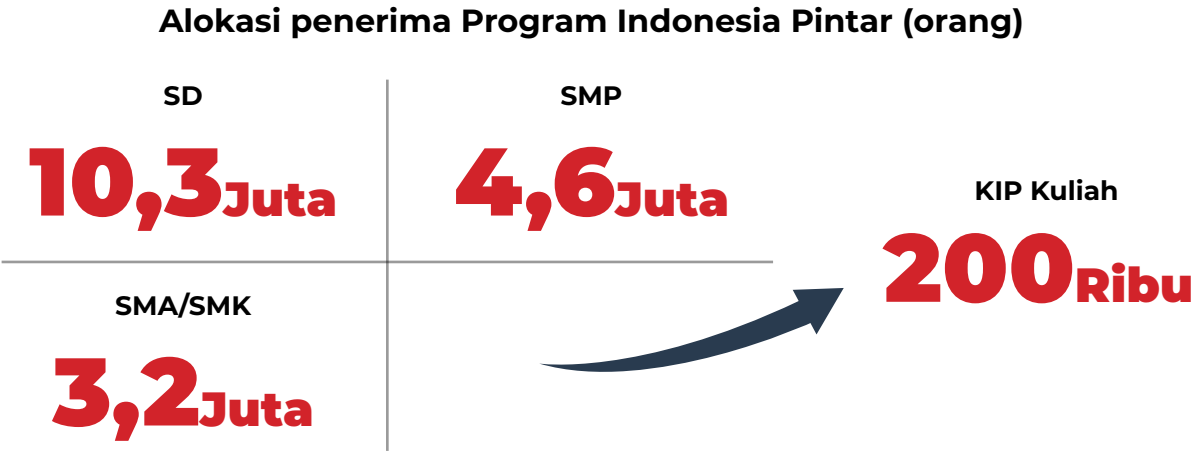
Jumlah Guru yang Bersertifikat



Sumber Data: Kemendikbud

Sekolah Gratis Hingga Sarjana

Sekolah hingga sarjana kini bisa dicapai semua kalangan masyarakat. Pemerintah menyediakan bantuannya dengan Kartu Indonesia Pintar. Upaya yang disiapkan untuk siswa SD, SMP, dan SMA. Kartu Indonesia Pintar Kuliah juga disiapkan untuk mereka yang terdata sebagai penerima KIP dan ingin melanjutkan pendidikan hingga jadi sarjana.



Sumber Data: Kemendikbud

Manfaat Program Indonesia Pintar

SD/MI/Paket A
Rp 450.000 / Tahun
SMP/MTs/Paket B
Rp 750.000 / Tahun
SMA/SMK/MA/Paket C
Rp 1.000.000 / Tahun



Pelajar Mengikuti Praktik Kejuruan Memasak
(Foto : Antara)

Merekatkan **Vokasi** dengan Dunia Kerja

Hubungan yang saling menguntungkan antara dunia pendidikan dan dunia kerja terus diupayakan dengan pendidikan vokasi. Sekolah vokasi menyiapkan SDM sesuai kebutuhan industri.

✓	14.084 SMK Yang Melakukan Kerjasama
✓	272.788 Jalinan Kerjasama antara SMK dengan DUDI
✓	190.842 Industri Yang menjadi mitra SMK
✓	87 Bidang Usaha Mitra industri SMK

Sumber Data: Kemendikbud

Program Kompetensi Pencari Kerja

Pemerintah menyiapkan Kartu Prakerja untuk mengatasi pengangguran. Program bantuan pelatihan yang diberikan untuk pencari kerja dan pekerja ter-PHK. Tujuannya agar mereka memiliki kompetensi tambahan sebelum mendapatkan pekerjaan baru. Selain sebagai program, Kartu Prakerja menjadi layanan publik pertama yang dijalankan secara digital dari hulu hingga hilir.

Program ini kolaborasi pemerintah dengan platform digital (*market place*) dan lembaga pelatihan. Di masa pandemi, Kartu Prakerja didesain menjadi “semi bansos”. Dalam tempo tujuh bulan sejak April diluncurkan, sudah 34,1 juta pendaftar.

**Jumlah Pendaftar
Kartu Prakerja**

34,1 Juta
orang

**Penerima Manfaat
Kartu Prakerja**

5,6 Juta
orang

**Anggaran yang
Terserap**

Rp 19,8 T

**Jumlah
Pelatihan Tersedia**

2.055
pelatihan

(data per 2 Oktober 2020)

Sumber Data: Manajemen Pelaksana Program Kartu Prakerja

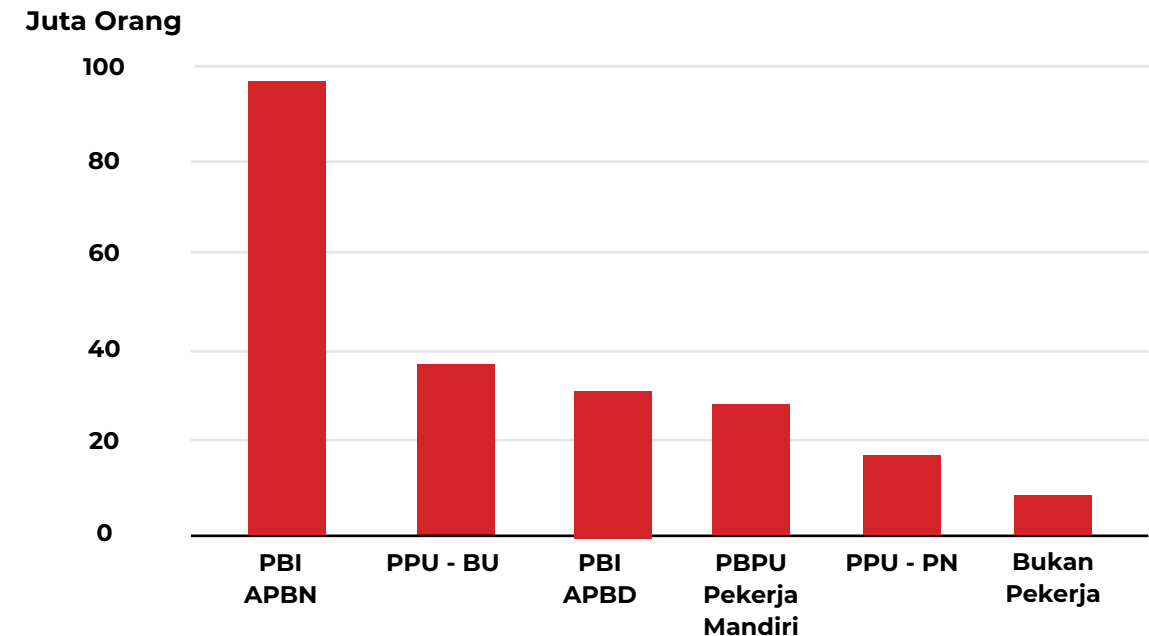
Membangun Indonesia Sehat

Reformasi fundamental kesehatan dilakukan pemerintah dengan memperbaiki sistem Jaminan Kesehatan Nasional. Seluruh rakyat Indonesia berhak mendapat pelayanan BPJS Kesehatan. Tujuan utamanya membangun ekosistem jaminan kesehatan yang berkeadilan.

Pemerintah dan daerah bergotong royong mensubsidi iuran Penerima Bantuan Iuran (PBI), Peserta Pekerja Bukan Penerima Upah (PBPU), dan Peserta Bukan Pekerja (BP).

Upaya pencegahan penyakit, pengembangan fasilitas kesehatan mulai dari Rumah Sakit hingga Balai Kesehatan terus dilakukan. Demikian pula dengan peningkatan fasilitas laboratorium, pengembangan industri obat, dan alat kesehatan.

Jumlah Peserta BPJS Kesehatan Berdasarkan Kategori Penerima Bantuan Iuran (31 Agustus 2020)



Sumber Data : Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan

Satu Data Kesehatan dari Genggaman

Mencegah lebih baik dari mengobati. Pemerintah menyiapkan portal satu data kesehatan berbasis keluarga agar ekosistem kesehatan masyarakat semakin kuat. Memantau kesehatan dari telepon pintar dengan M-Health.

Setiap keluarga mendapatkan notifikasi status kesehatannya, dengan 12 indikator. Melalui portal ini, akses keluarga terhadap indikator kesehatan dapat diperoleh dalam genggaman tangan.



Sekolah Dasar Jayapura, Papua
(Foto : Antara)

Infrastruktur dan Energi Tetap Berkeadilan

Pandemi COVID-19 mengakibatkan beberapa pembangunan infrastruktur untuk sementara mengalami penundaan. Salah satunya pembangunan Ibu Kota Negara (IKN). Sementara pembangunan infrastruktur tetap berlanjut demi mewujudkan ketahanan air, kedaulatan pangan, dan ketahanan energi.

Pemerintah melakukan *refocusing* dan realokasi anggaran dengan prioritas pada penanganan dampak COVID-19. Kebijakan energi berkeadilan tetap menjadi perhatian utama. Di mana setiap masyarakat Indonesia mempunyai akses yang sama terhadap energi.



Kapal BBM 1 Harga
(Foto : Antara)

Terus Mengejar Investasi **Infrastruktur**

Ketersediaan infrastruktur mempercepat ekspansi ekonomi. Stok infrastruktur Indonesia terhadap PDB naik drastis.

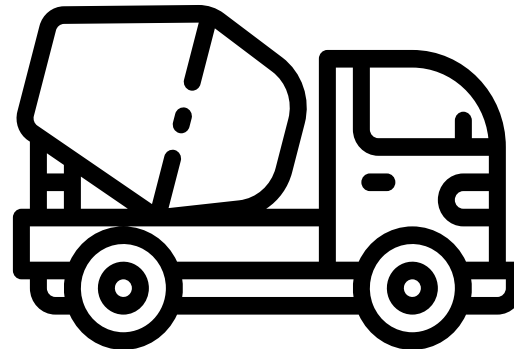
Pada tahun 2015, nilai stok infrastruktur Indonesia angkanya 35 persen. Dalam kurun waktu empat tahun naik 8 persen. Angka ini akan terus digenjut mengejar ketertinggalan standar global minimal sebesar 70 persen.

**Stok infrastruktur
Indonesia terhadap PDB**



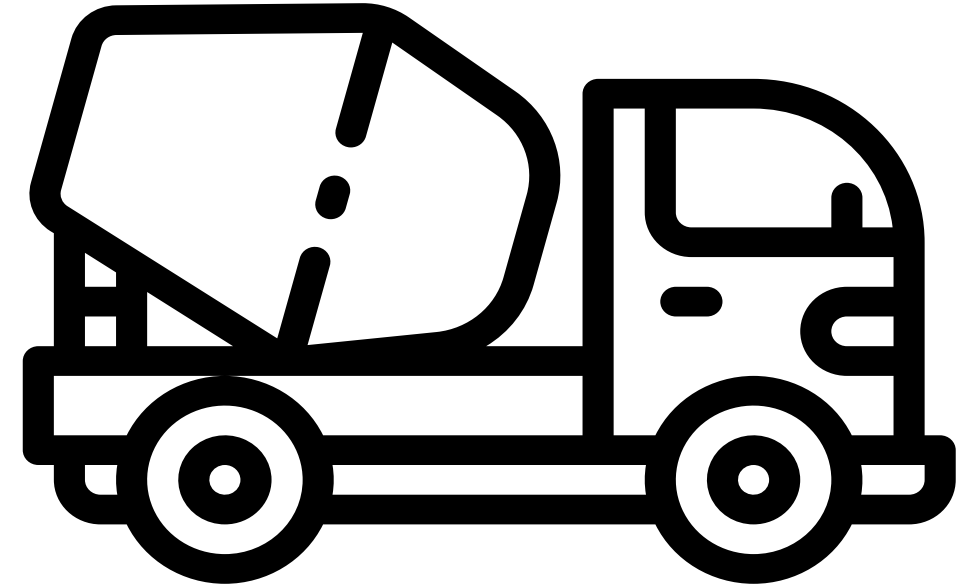
35%

2015



43%

2019



70%

Standar Global

Sumber Data: Kementerian PUPR



Infrastruktur dan Konektivitas
(Foto: Antara)

Konektivitas Pangkas Biaya Logistik

Meskipun investasi infrastruktur masih jauh tertinggal, Pemerintah mempercepat ketersediaan infrastruktur konektivitas. Hal ini untuk menurunkan biaya logistik dan memberikan kemudahan bagi rakyat menuju fasilitas sosial dasar.

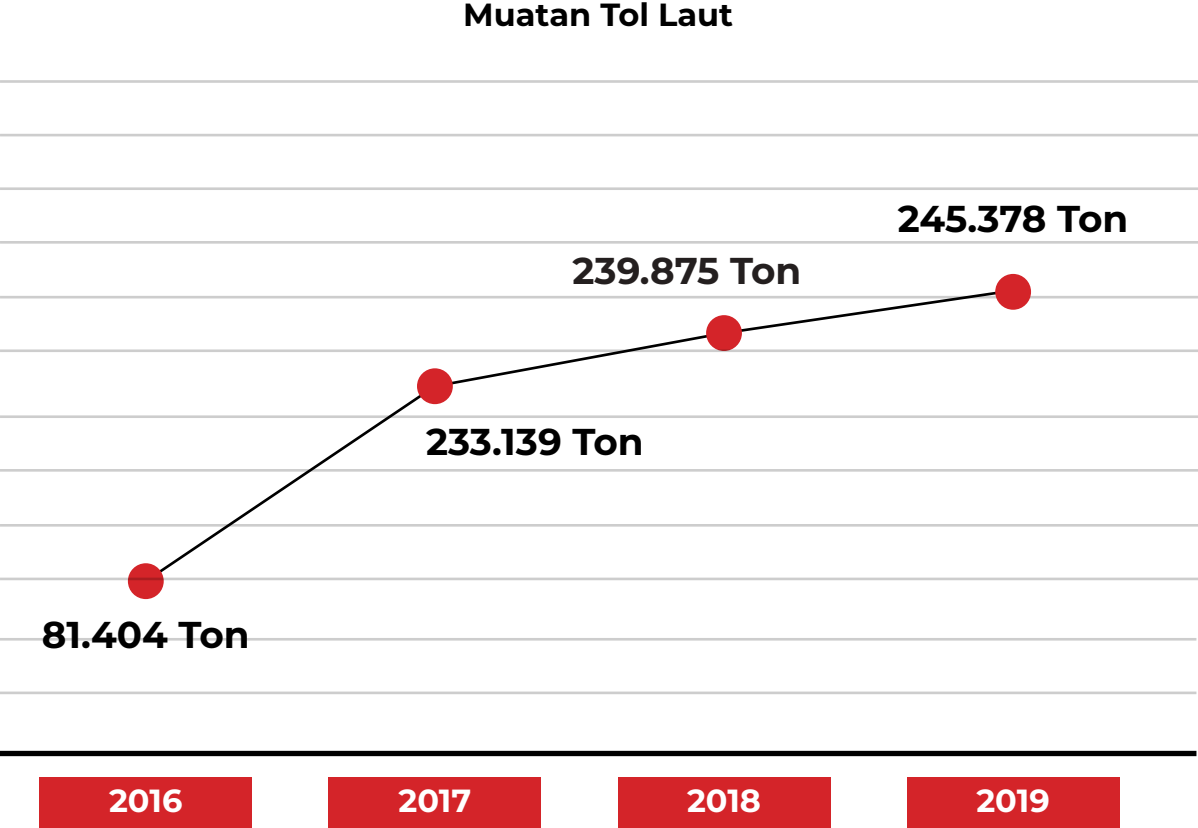
Daerah-daerah yang dulu terpisah kini telah tersambung. Peringkat konektivitas infrastruktur kita membaik. Pekerjaan rumah yang tersisa kini tinggal menurunkan biaya logistik. Biaya logistik Indonesia saat ini masih 23,5% dari Produk Domestik Bruto (PDB). Angka ini masih tertinggi di antara negara-negara Asia Tenggara. Biaya logistik ini harus dipangkas.

Jembatan Udara Buka Wilayah **Terisolir**

Wilayah Indonesia dengan jumlah lebih dari 17.000 pulau membuat banyak daerah yang sulit diakses. Akibatnya daerah terluar, terisolir, dan tertinggal membutuhkan biaya mahal untuk lalu lintas orang dan barang.

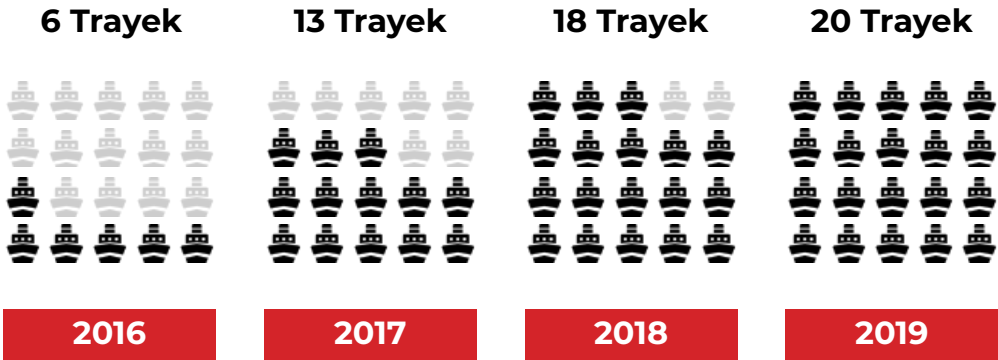
Pemerintah terus mengupayakan kemudahan akses dengan membangun jembatan udara. Upaya ini akan menurunkan jurang perbedaan atau disparitas harga barang sehingga perekonomian berangsur tumbuh.





Tol Laut Pacu **Ekonomi**

Bukan hanya jembatan udara, program tol laut sekelas *backbone* juga sudah digarap sejak 2015. Tol laut ini dapat digunakan kapal berkapasitas besar demi menekan disparitas harga barang antara Pulau Jawa dan daerah terluar, terisolir, dan tertinggal.



Sumber Data: Kementerian Perhubungan

Wujudkan Mimpi Energi Berkeadilan

Minyak dan gas bumi tidak lagi sekedar komoditi. Migas menjadi lokomotif pembangunan. Perubahan paradigma ini memacu pertumbuhan industri dalam negeri. Smelter dibangun. Kilang-kilang minyak diperbaharui. Gas bumi bagi industri dalam negeri dan pemanfaatan sumber daya alam baru dan terbarukan dioptimalkan.

Mimpi besar keadilan pada akses energi bagi rakyat diwujudkan dengan menjadikan migas bukan barang mewah bagi masyarakat pedalaman dan terisolir. Juga, masyarakat berpendapat rendah mendapatkan akses yang sama.

Kronologi Penurunan Harga Gas Bumi untuk 7 Sektor Industri



Geothermal Ciwidey, Bandung, Jawa Barat
(Foto : Antara)

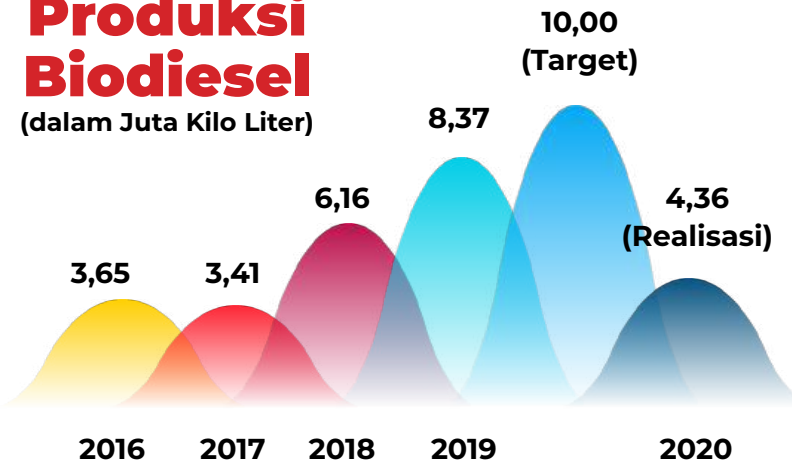
Memangkas Harga Gas

“Kita kalah terus, produk-produk kita (kalah bersaing), gara-gara harga gas kita yang mahal,” kata Presiden dalam rapat terbatas awal tahun 2020.

Presiden mengambil risiko untuk menurunkan harga gas bumi demi meningkatkan daya saing global tujuh kelompok industri. Penurunan harga gas dengan mengurangi jatah Pemerintah.

Gas bumi memiliki porsi sangat besar pada struktur biaya produksi. Keputusan menurunkan harga gas langsung berpengaruh pada daya saing produk industri kita di pasar dunia.

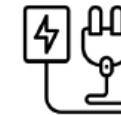
Produksi Biodiesel (dalam Juta Kilo Liter)



14,95%
Bauran Energi



99,09%
Listrik Rumah Tangga



61.859
Konverter Kit



174
SPBU BBM 1 Harga



110.668
Lampu Surya

Sumber Data: Kementerian ESDM

Bertekad Jadi Pemain Utama

Energi masa depan adalah energi bersih. Tren dunia otomotif mengalami perubahan besar dengan hadirnya kendaraan listrik. Indonesia tidak ingin hanya menjadi konsumen namun, bertekad menjadi pemain utama. Ekosistem pun disiapkan.

Percepatan pembangunan pembangkit berbasis EBT, seperti PLTA, tenaga surya, hingga panas bumi. Target tahun 2025 penggunaan Energi Baru dan Terbarukan (EBT) mencapai 23 persen. Angka optimis dibandingkan capaian tahun ini yang kurang dari 15 persen.



Uji Coba Bus Listrik Gratis
(Foto : Antara)

Kontraksi Ekonomi Bukan Kartu Mati

Pandemi memukul perekonomian dunia. Sejumlah negara tumbang, pertumbuhan ekonominya terpuruk. Indonesia terdampak, meski dangkal. Kuartal kedua 2020, pertumbuhan ekonomi Indonesia mengalami kontraksi 5,3 persen.

Angka ini jauh lebih baik dibandingkan negara Asia Tenggara lainnya, bahkan di antara negara G-20. Indonesia berada di peringkat ketiga di bawah Tiongkok dan Korea Selatan.

COVID-19 berdampak pada 3,5 juta pekerja terkena PHK atau dirumahkan. Pengangguran naik menjadi 10,4 juta orang. Angka kemiskinan meningkat menjadi 26,42 juta orang, terutama di perkotaan.



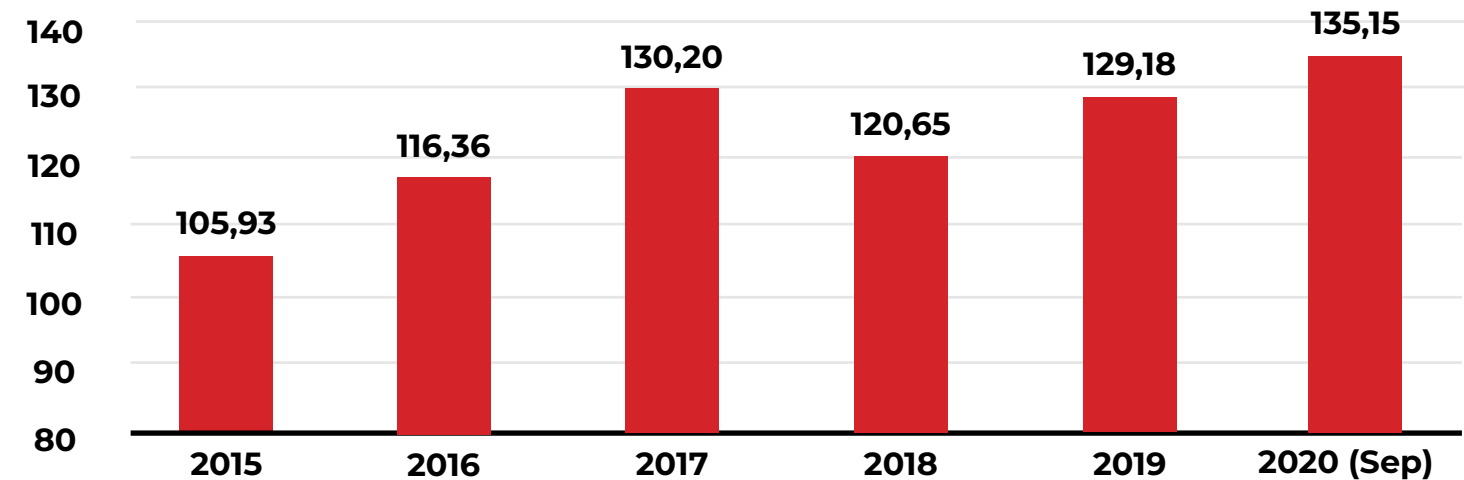
IHSG Pertengahan September Ditutup Menguat
(Foto : Antara)

Adaptif Kelola Neraca

Sejumlah pukulan telak segera dicarikan obatnya. Tata kelola keuangan yang adaptif membawa dampak positif. Dengan cadangan devisa USD 135,15 Miliar (September 2020) mampu membiayai impor dan membayar utang luar negeri pemerintah selama 9,1 bulan. Rentang waktu ini, lebih dari tiga kali lipat di atas standar internasional.

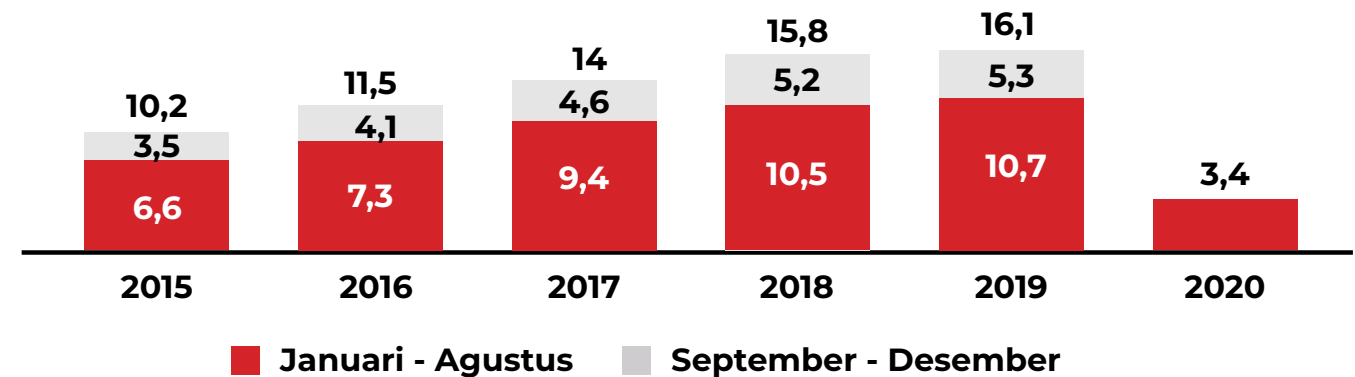
Pemerintah harus tetap mewaspadaai cadangan devisa yang dimiliki dengan mempersiapkan potensi di sektor pariwisata. Indonesia memiliki potensi tujuan wisata yang cukup besar dengan lima destinasi super prioritas. Yaitu Toba, Borobudur, Mandalika, Labuan Bajo dan Likupang.

Cadangan Devisa



Sumber Data: Bank Indonesia

Kunjungan Wisatawan (Juta)



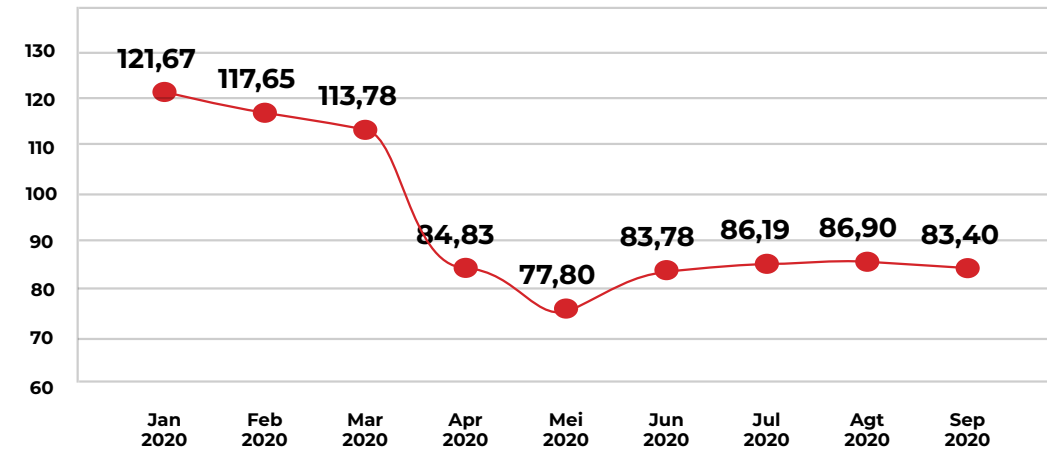
Sumber Data: BPS

Sinyal Perbaikan Kondisi **Ekonomi**

Rasio utang pemerintah yang kurang dari 35 persen dari Produk Domestik Bruto (PDB), menunjukkan pengelolaan utang dengan prinsip kehati-hatian. Rating utang ini menunjukkan Indonesia masih layak sebagai tujuan investasi.

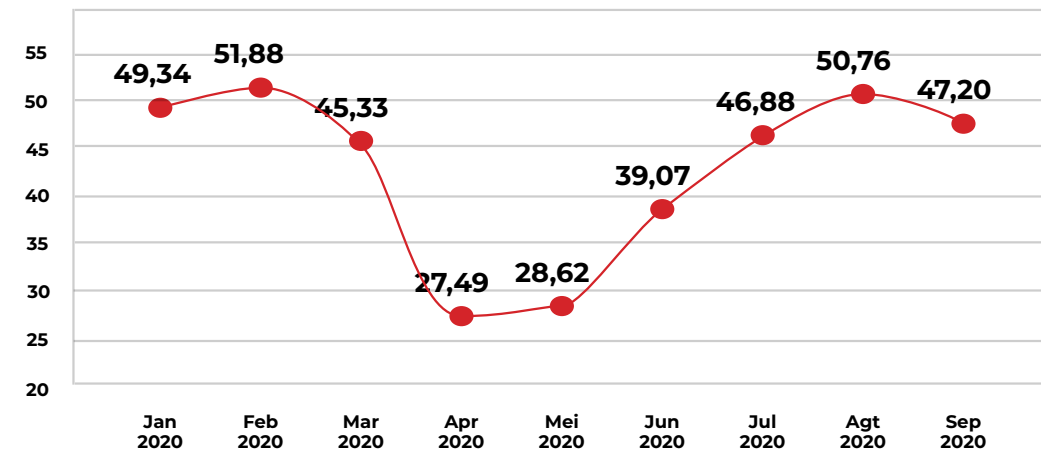
Sinyal perbaikan kondisi ekonomi kedepan mulai tampak dari perbaikan indikator Purchasing Manager Index di bidang manufaktur dan Indeks Keyakinan Konsumen. Pemerintah memberi perhatian besar pada usaha kecil dan menengah (UMKM) untuk bertahan ditengah krisis.

Indeks Keyakinan Konsumen



Sumber Data: Bank Indonesia

Purchasing Manager Index



Sumber Data: IHS Markit

Data Perkembangan UMKM GO Digital



Sumber Data: Kementerian Koperasi dan UMKM

Kredit Usaha Rakyat	Kredit Ultra Mikro (Umi)	Mekaar
Jumlah Penyaluran Rp 107,28 T	Jumlah Penyaluran Rp 4,85 T	Jumlah Penyaluran Rp 11,2 T
Jumlah Debitur 3.172.616 (Realisasi s/d 15 Sept 2020)	Jumlah Debitur 1.499.953 (Realisasi s/d 25 Sept 2020)	Jumlah Debitur 6,57 Juta (Realisasi s/d 31 Agt 2020)

Sumber Data: DJPB-Kemenkeu dan PNM

Agar Lumbung Tak Suwung

Sejumlah insentif ditujukan pada UMKM sebagai upaya pengentasan kemiskinan, pemerataan ekonomi, dan penciptaan lapangan kerja. Pemerintah mengalokasikan Rp 4,2 triliun untuk program UMKM Go Digital.

UU Cipta Kerja diajukan untuk menciptakan iklim investasi yang kompetitif dan membuka lapangan kerja. Regulasi ini sekaligus memberi kemudahan dalam perizinan UMKM.

Sementara lembaga pangan dunia (FAO) mengeluarkan peringatan potensi kelangkaan pangan dunia dampak pandemi COVID-19 di masa mendatang. Pemerintah bergegas menyiapkan produksi pangan berkelanjutan. Pemerintah membenahi statistik pangan dengan Kerangka Sampel Area, Perluasan Areal Tanam Baru, dan Inisiasi Food Estate.

Jalan Terjal Reformasi Birokrasi dan Regulasi

Tekad mencapai negara maju hanya bisa dilakukan dengan cara cara luar biasa. Pemerintah termasuk birokrat harus mereformasi diri. Tidak hanya pola pikir tapi juga pada etos kerja. Tidak semata berorientasi pada proses tetapi juga hasil. Tidak sekedar sent tapi making delivered.

Birokrasi tak sekedar melaksanakan sebuah kebijakan tapi memastikan masyarakat menikmati layanan. Kuncinya adalah kecepatan melayani, memberikan izin.

Struktur organisasi perlu disederhanakan menjadi fungsional sesuai kompetensi. Birokrasi bersih, pemangkasan izin, penyelamatan keuangan negara menjadi strategi nasional pencegahan korupsi. Reformasi Birokrasi dilakukan seiring dengan Reformasi Regulasi. Penyederhanaan regulasi di antaranya melalui Undang-Undang Cipta Kerja.



ASN Provinsi Papua Mulai Berkantor
(Foto : Antara)

Pangkas Aturan Efektifkan Birokrasi

Pemerintah menerobos penghalang yang membuat dunia usaha sulit bertumbuh di Indonesia. Penyebabnya adalah banyaknya aturan yang saling tumpang tindih dan memperpanjang birokrasi izin yang berpotensi korupsi.

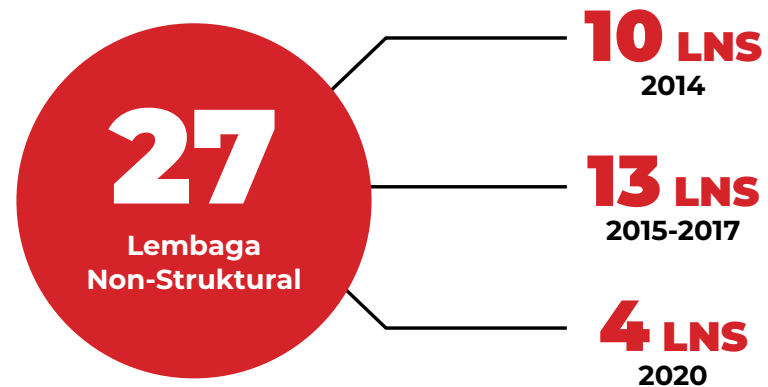
Omnibus law menjadi solusi mengurai keruwetan aturan. Undang-Undang Cipta Kerja salah satunya, meringkas 79 UU dan menyatukan 11 klaster menjadi satu aturan. Metode omnibus law diharapkan jadi obat yang *cespleng* menghasilkan produk hukum yang efisien dan aspiratif.



Mal Pelayanan Publik
(Foto : Antara)



Jumlah Lembaga Non-Struktural yang dipangkas



Sumber Data: KemenPanRB

Demi Gerak Kian Lincah

Pemerintah memangkas lembaga non struktural yang fungsinya saling tumpang tindih agar efektif dan efisien.

Eselon disederhanakan hanya dua level saja. Perannya digantikan jabatan fungsional yang menghargai kompetensi.

Birokrasi yang lincah ini dipastikan untuk mencapai tujuan pembangunan. Tidak ada ampun bagi birokrat yang tidak serius dalam bekerja.



Mesin Anjungan Dukcapil Mandiri
(Foto : Antara)

Urusan Selesai dengan **Dilan**

Reformasi birokrasi harus menjamin perbaikan pelayanan publik tak hanya konvensional tapi juga digitalisasi. Seiring dengan transformasi digital, kini segala urusan semakin mudah dengan Dilan atau Digital Melayani. Dengan satu klik, Dilan memangkas jalur yang ruwet akibat prosedur berbelit dan maraknya praktik pungli.

Birokrasi digital bisa menjadi kunci tetap berjalannya pelayanan publik di tengah pandemi. Tidak lagi terbatas pada sistem kerja dari rumah atau fasilitas presensi virtual tapi mampu menjangka sektor pelayanan spesifik di setiap lembaga. Termasuk salah satu faktor yang membatasi penyebaran COVID-19 di kantor.

Bisa berjalan di segala sektor, Dilan pada akhirnya menjadi alarm penanda Indonesia berproses menjadi negara maju.

Kepalang Malu Jika **Korupsi**

Butuh kolaborasi antar kementerian dan lembaga, pusat maupun daerah, serta pemangku kepentingan lainnya untuk menjalankan strategi besar pencegahan korupsi. Sektor yang rentan korupsi: perizinan dan tata niaga, keuangan negara, penegakan hukum dan reformasi birokrasi.

Pandemi menjadi momentum pembenahan tata kelola pemerintahan yang cepat, produktif, efisien dan akuntabel. Tapi juga menjadikan anti korupsi sebagai gerakan budaya untuk menumbuhkan rasa malu jika korupsi.



Meneguhkan Kembali Indonesiasentris

Pandemi tak membuat negara berhenti untuk hadir di segenap pelosok tanah air. Pemerintah memastikan pembangunan harus berjalan di segala sektor hingga terwujudnya keadilan yang merata.

Daerah pinggiran menjadi prioritas. Papua, Papua Barat, dan kawasan timur Indonesia kini menjadi perhatian utama. Presiden bahkan menunjuk Wakil Presiden K.H. Ma'ruf Amin sebagai Ketua Dewan Pengarah Percepatan Pembangunan Papua.

Ada banyak daerah tertinggal di seluruh tanah air yang perlu segera dibangun agar tidak terjadi kesenjangan antarwilayah. Bukan hanya pembangunan fisik tapi juga pembangunan mental. Pemerintah ingin memastikan pembangunan merata di semua wilayah. Negara harus hadir untuk memastikan terwujudnya Indonesiasentris.



Indonesiasentris
(Foto : Antara)

Hidup Sejahtera di Daerah Pinggiran

Indonesia harus mempercepat pembangunan di daerah pinggiran sebagai bentuk keadilan sosial. Tak hanya terpusat di Jawa, tapi juga di daerah tertinggal. Tahun 2015 ada 122 daerah tertinggal, kini tinggal 62 daerah.

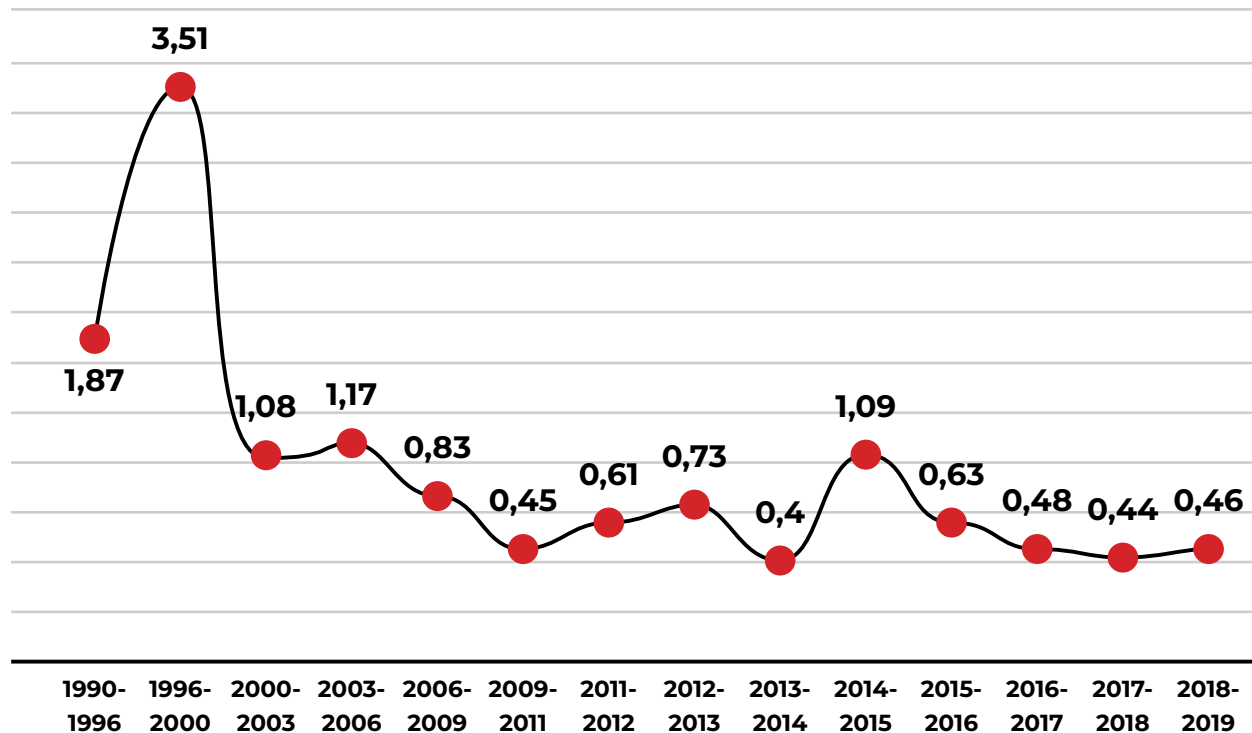
Perlu inovasi-inovasi untuk percepatan pembangunan daerah tertinggal. Salah satunya dengan mendekatkan produsen di daerah tertinggal dengan konsumen di seluruh Indonesia.

Transformasi digital jawabannya. Saat ini, sudah ada 8.876 produk telah terjual lewat *market place*, dan telah dibangun 84 pusat layanan bisnis online.



Perjalanan Desa ke Desa Adat Waerebo
(Foto : Antara)

Laju peyusutan hutan (Juta/hektare)



Sumber Data: Kementerian LHK

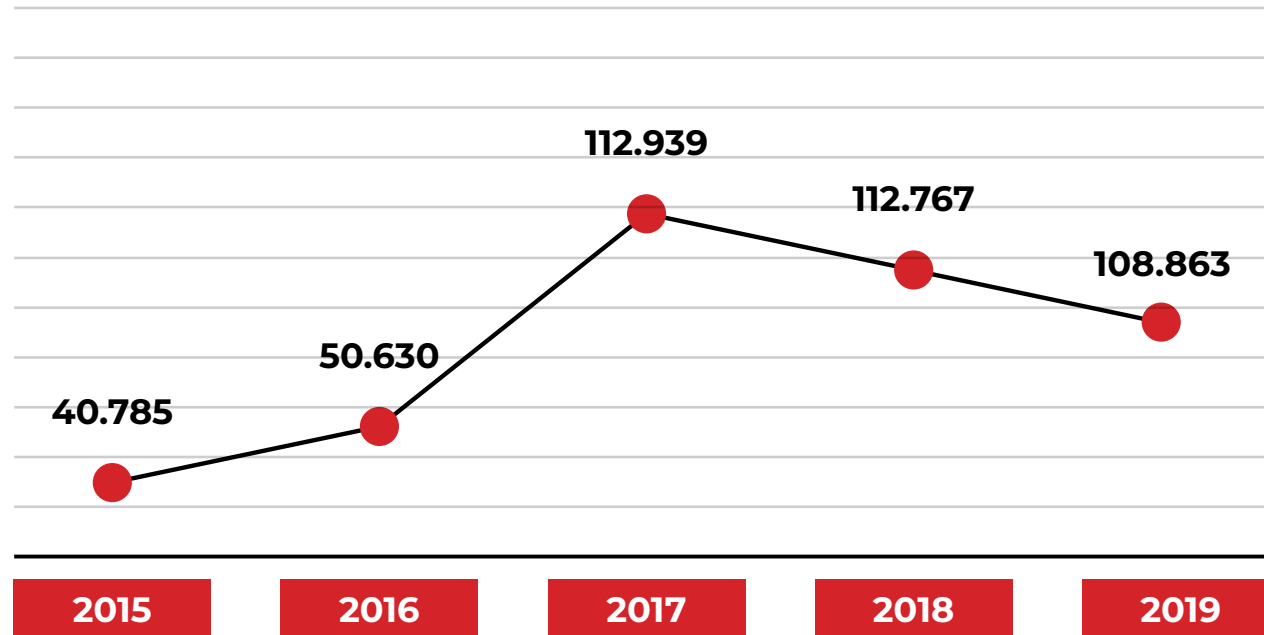
Mengurangi Emisi Karbon

Pemerintah menetapkan lima sektor prioritas untuk mewujudkan komitmen Indonesia mengurangi emisi karbon sesuai Paris Agreement 2015. Lima sektor itu adalah kehutanan dan lahan gambut, pertanian, energi dan transportasi, industri dan limbah, serta adaptasi dampak perubahan iklim.

Sudah lebih dari 3,47 juta hektar lahan gambut dipulihkan. Tutupan lahan di daerah tangkapan air sepanjang DAS Citarum meningkat menjadi 77,3 ribu hektar.

Pada tahun ini, Indonesia mendapatkan komitmen dari dunia internasional sebesar US\$ 12,01 juta dari Green Climate Fund dan US\$ 56 Juta dari Pemerintah Norwegia.

Penyandang Disabilitas yang Mendapatkan
Program Keluarga Harapan (orang)



Sumber Data: Kemensos

Kesetaraan Hak Kaum **Difabel**

Perhatian serius bagi penyandang disabilitas tidak pernah berkurang. salah satunya dengan membentuk Komisi Nasional Disabilitas, di tengah moratorium pembentukan lembaga baru.

Pembentukan komisi ini merupakan amanat UU tentang Penyandang Disabilitas. Kini, melalui Perpres No 68 tahun 2020, pembentukan Komisi Nasional Disabilitas (KND) bukti pemerintah memberikan perlindungan, penghormatan dan pemenuhan para penyandang disabilitas.

Pada Rumah Besar Pancasila

Toleransi dan kerukunan sebagai modal sosial kebangsaan yang terus dijaga. “Hanya dengan bersatu, kita akan menjadi negara kuat dan disegani,” begitu ajakan Presiden Joko Widodo pada acara Visi Indonesia tahun lalu.

Pesan ini menjadi bukti pentingnya toleransi semua warga negara. Menyelaraskan perbedaan dengan rumah besar Pancasila menjadi sesuatu yang indah.

Tidak ada lagi orang Indonesia, yang tidak toleran terhadap perbedaan. Tidak ada lagi orang Indonesia, yang tidak menghargai penganut agama lain, warga suku lain, dan etnis lain.



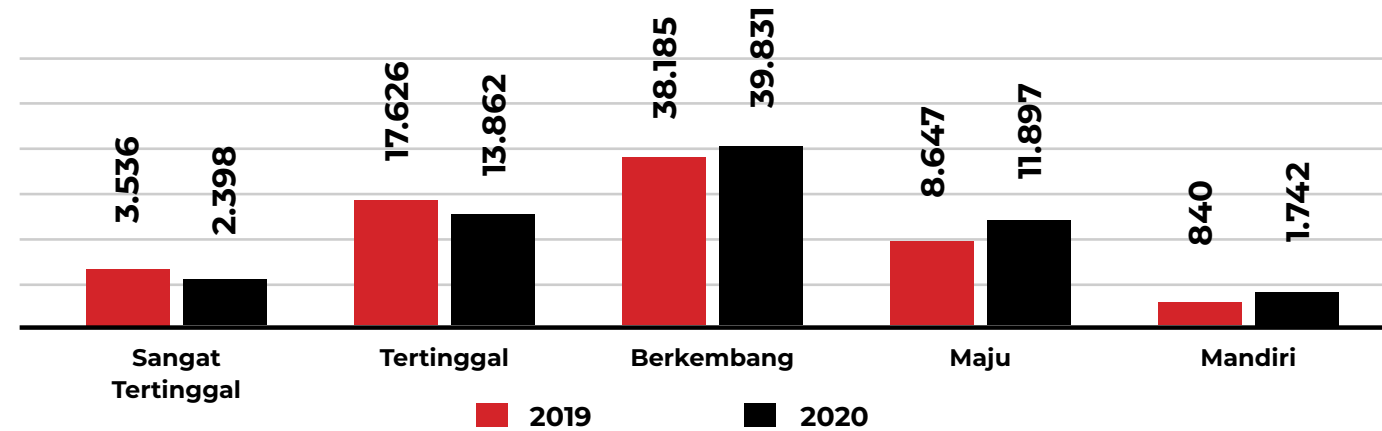
Pembagian Daging Kurban di Bali
(Foto : Antara)

Memakmurkan Desa

Optimisme membangun Indonesia dari desa ibarat gayung bersambut. Potensi besar yang dimiliki desa ditambah dengan daya dorong pemberian Dana Desa (DD) terus meningkat. Program ini mampu menurunkan persentase kemiskinan menjadi 12,6 persen.

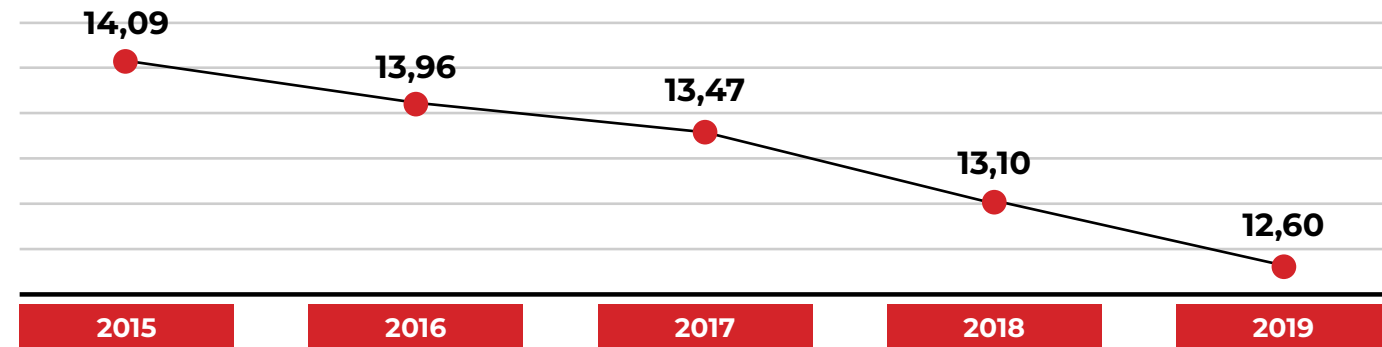
Dalam lima tahun terakhir, hasil dari pemanfaatan dana desa dirasakan oleh masyarakat melalui peningkatan kinerja pelayanan dasar publik, seperti akses rumah tangga terhadap air minum dan sanitasi layak, serta persalinan yang dibantu oleh tenaga kesehatan.

Data perkembangan Desa



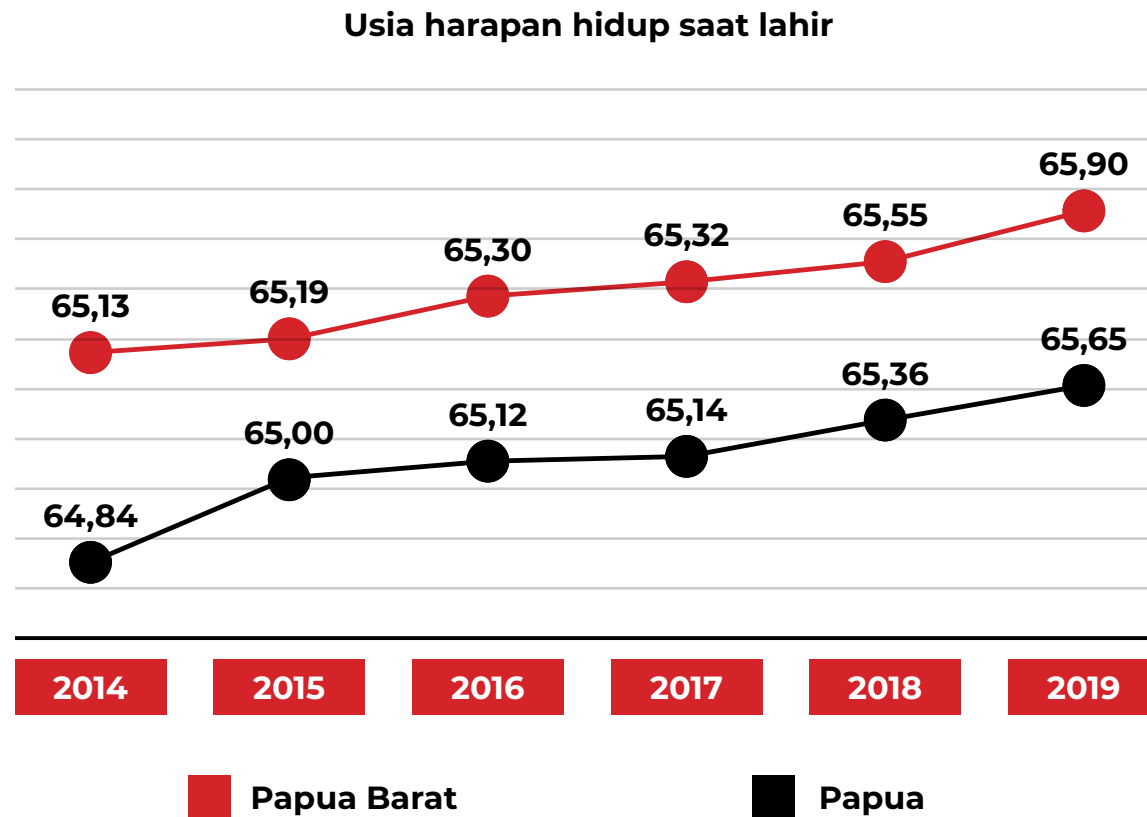
Sumber Data: Kemendes & PDTT

Penurunan Kemiskinan Desa



Sumber Data: BPS

Kerangka Baru Pembangunan Papua



Sumber Data: BPS

Lima tahun pertama pemerintahan, Presiden Joko Widodo berkunjung 12 kali ke Papua. Kunjungan yang sering ke dua provinsi ujung timur negeri ini untuk membangun kepercayaan masyarakat Papua. “Pendekatan Papua yang kita lakukan adalah dialog dan kesejahteraan, itu yang kita lakukan,” kata Presiden.

Pada periode kedua pemerintahan, pendekatan kesejahteraan menjadi garda depan. Penerbitan Inpres Nomor 9 tahun 2020 tentang Percepatan Pembangunan Kesejahteraan di Provinsi Papua dan Papua Barat juga memberikan ikatan yang kuat agar lima kerangka baru untuk Papua terlaksana.

Kerangka baru Papua berupa: percepatan pembangunan SDM, transformasi dan pembangunan ekonomi yang berkualitas dan berkeadilan, percepatan pembangunan infrastruktur, peningkatan dan pelestarian kualitas lingkungan hidup serta reformasi birokrasi.



#BangkitUntukIndonesiaMaju



Penutup

Laporan ini sebenarnya lebih mirip catatan dan rekam jejak bahwa Presiden senantiasa berusaha memenuhi janjinya. Tetap berpegang pada mimpinya untuk meletakkan fondasi bagi Indonesia Maju, Presiden bertekad melaksanakan visi dan misi yang disampaikan saat pelantikan – 20 Oktober 2019 – untuk mewujudkan lima arahan strategis menuju masyarakat Indonesia yang mandiri, maju adil dan makmur: meningkatkan pembangunan Sumber Daya Manusia,

keberlanjutan pembangunan infrastruktur, transformasi ekonomi, penyederhanaan regulasi dan reformasi birokrasi.

Apa yang dilakukan dalam setahun ini, sesungguhnya adalah kelanjutan dari periode sebelumnya. Kinerja pemerintahan, melalui berbagai program pemerintah merupakan bagian dari rencana pembangunan yang harus diimplementasikan oleh semua kementerian dan lembaga. Secara keseluruhan, banyak capaian kinerja sesuai rencana, namun tak

sedikit yang mengalami penjadwalan ulang karena situasi dan kondisi.

Pandemi COVID-19 yang melanda dunia termasuk Indonesia, menjadi faktor yang mempengaruhi berbagai rencana dan program. Efek domino pandemi berupa krisis di segala sektor adalah tantangan yang harus dihadapi. Penjadwalan program terpaksa dilakukan, karena prioritas utama adalah menyelamatkan rakyat dari wabah, sekaligus agar krisis kesehatan tak menjadi krisis kemanusiaan.



Justru dalam situasi krisis seperti inilah, Presiden Joko Widodo menyerukan kebangkitan baru. Targetnya bukan hanya lepas dari pandemi, tapi membuat lompatan kemajuan di segala sektor. Mumpung peta global lagi dinamis akibat pandemi di mana negara-negara besar di dunia mengalami kemunduran.

Transformasi dan reformasi dilakukan di tengah segala keterbatasan. Refocusing dan realokasi anggaran diprioritaskan pada penanganan kesehatan, pemulihan sosial dan ekonomi. Terutama upaya menangani penyakit menular, pola hidup sehat warga dan pelayanan kesehatan yang lebih prima bagi masyarakat.

Di bidang ekonomi, usaha mikro kecil dan menengah serta koperasi menjadi prioritas untuk didorong lebih maju, dengan transformasi digital. Juga Kartu Prakerja untuk antisipasi pengangguran baru dan yang terkena PHK. Jangka panjang adalah pelaksanaan UU Cipta Kerja yang didesain untuk mengantisipasi pengangguran yang selalu bertumbuh dengan penciptaan lapangan kerja.

Program infrastruktur dan energi tetap berkelanjutan dari periode sebelumnya dengan melihat dampaknya bagi kesejahteraan rakyat dan pertumbuhan ekonomi. Ada beberapa yang terpaksa mundur jadwal, di antaranya pemindahan Ibukota Baru meski tetap dalam

agenda. Tapi sebaliknya, proyek-proyek padat karya diperbanyak.

Reformasi birokrasi kian didorong untuk menggenjot proses *recovery* dan meningkatkan produktivitas. Tak lagi kerja berorientasi proses tapi harus berorientasi hasil. Tugas pemerintah dan birokrasi bukan sekedar membuat dan melaksanakan kebijakan, tapi juga membuat masyarakat menikmati dan merasakan manfaat serta hasilnya.

• • •



(Foto : Antara)



LAPORAN TAHUNAN 2020

BANGKIT UNTUK **INDONESIA MAJU**